KEBIJAKAN *HALAL TOURISM* SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN *FOREIGN DIRECT INVESTMENT* BIDANG KEPARIWISATAAN DI PULAU LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S. Sos) dalam Bidang Hubungan Internasional

Oleh:
OMI SARAH
NIM. I72214012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

JULI 2018

PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Omi Sarah
NIM	: I72214012
Program Studi	: Hubungan Internasional
Judul Skripsi	: Kebijakan *Halal Tourism* sebagai Strategi Peningkatan *Foreign Direct Investment* bidang Kepariwisataan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 12 Juli 2018
Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
87B48AFF262495405
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Omi Sarah
NIM: I72214012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama	: Omi Sarah
NIM	: I72214012
Program Studi	: Hubungan Internasional

yang berjudul: **"Kebijakan *Halal Tourism* sebagai Strategi Peningkatan *Foreign Direct Investment* Bidang Kepariwisataan di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat",** saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 12 Juli 2018
Pembimbing

Ridha Amaliyah, S. IP, MBA
NIP: 201409001

PENGESAHAN

Skripsi oleh Omi Sarah dengan judul: **"Kebijakan *Halal Tourism* sebagai Strategi Peningkatan *Foreign Direct Investment* Bidang Kepariwisataan di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat"** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 25 Juli 2018.

Surabaya, 03 Agustus 2018

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

Ridha Amaliyah, S.IP, MBA
NIP. 201409001

Penguji II

Zaky Ismail, M.S.I
NIP. 198212302011011007

Penguji III

M. Fathoni Hakim, M.Si
NIP. 198401052011011008

Penguji IV

Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int., M.A.
NIP. 199003252018012001

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip. SEA, M.Phil, Ph.D.
NIP. 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Omi Sarah
NIM : I72214012
Fakultas/Jurusan : FISIP/Hubungan Internasional
E-mail address : omisarah08@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
"Kebijakan *Halal Tourism* sebagai strategi Peningkatan *Foreign Direct Investment* Bidang Kepariwisataan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat."

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 September 2018

Penulis

(Omi Sarah)

ABSTRAK

Omi Sarah, 2018, *Kebijakan Halal Tourism sebagai Strategi Peningkatan Foreign Direct Investment Bidang Kepariwisataan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat***,** Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: *Halal Tourism, Foreign Direct Investment, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.*

Fenomena Hubungan Internasional yang dikaji dalam penelitian ini ialah kebijakan *Halal Tourism* Pemerintah Indonesia sebagai strategi dalam meningkatkan investasi asing khususnya dalam industri pariwisata. Sebagai pulau yang terkenal dengan destinasi *halal tourism* favorit di Indonesia bahkan dunia, Pulau Lombok memiliki daya tarik tersendiri dalam hal industri pariwisata. Oleh karena itu, terdapat dua rumusan masalah yang difokuskan dalam penelitian ini, yakni terkait definisi dari *Halal Tourism* yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat dan keunggulan dari kebijakan *Halal Tourism* di pulau seribu masjid tersebut sehingga menjadikan industri pariwisata halal di pulau tersebut sukses menarik investor asing untuk berinvestasi dalam industri pariwisata nya.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif guna menjelaskan secara rinci mengenai latar belakang hingga operasionalisasi kebijakan *Halal Tourism* di lapangan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik wawancara dan dokumentasi. Untuk menjelaskan fenomena tersebut, penelitian ini mengunakan teori *Competitive Advantage of Nations* yang dicetuskan oleh Michael Porter.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa; (1) Kebijakan *Halal Tourism* yang diterapkan pemerintah Indonesia khususnya di Pulau Lombok ialah kebijakan dalam industri pariwisata yang berkonsep pada nilai-nilai syari'ah dalam Islam. Kebijakan *halal tourism* menjadi istimewa dikarenakan pemerintah setempat memiliki komitmen yang kuat dalam keberlangsungan pariwisata halal. Komitmen tersebut dapat dilihat melalui peraturan pemerintah setempat yang mengatur sedemikian rupa segala sesuatu mengenai *halal tourim* mulai dari definisi, ruang lingkup, pengelolaan, pengawasan, pemeliharaan hingga pengembangan. (2) Model kebijakan *halal tourism* di Pulau Lombok berhasil dalam meningkatkan modal asing bidang pariwisata. Model kebijakan tersebut meliputi insentif keringanan pajak, deregulasi, debirokratisasi, peningkatan promosi, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia di bidang pariwisata. Selain itu, struktur pemerintahan dan kebijakan yang relevan juga mendukung dalam kemajuan pariwisata khususnya dari segi investasi asing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI iv
ABSTRAK v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR TABEL x
DAFTAR BAGAN xi
DAFTAR GRAFIK xii
BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 13
D. Manfaat Penelitian 13
E. Kerangka Konseptual 15
F. Argumentasi Utama 22
G. Sistematika Pembahasan 22
BAB II : KAJIAN TEORITIK 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Penelitian Terdahulu 26

B. Competitive Advantage of Nations 33

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....46

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 46

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 47

C. Pemilihan Subyek Penelitian 47

D. Tahap-Tahap Penelitian 50

E. Teknik Pengumpulan Data..... 54

F. Teknik Analisis Data..... 58

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data..... 61

BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 64

A. Konsep *Halal Tourism* di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat .. 64

1. Definisi Konsep *Halal Tourism* di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat..... 64

2. Ruang Lingkup *Halal Tourism* di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat..... 68

3. Tata Kelola *Halal Tourism* di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat..... 74

4. Langkah-langkah Pengembangan *Halal Tourism* di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat..... 75

B. Kebijakan *Halal Tourism* di Pulau Lombok sebagai Strategi Peningkatan *Foreign Direct Investment* Bidang Pariwisata di Lombok, Nusa Tenggara Barat 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kebijakan *Halal Tourism* di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat terkait Investasi Asing.....79
2. Investasi Asing bidang pariwisata terkait keberadaan *Halal Tourism* di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.....84

C. Analisis Kebijakan *Halal Tourism* Di Pulau Lombok Sebagai Strategi Peningkatan Investasi Asing Bidang Kepariwisataan Tinjauan Teori Michael Porter.....89
1. Factor Conditions 90
1.1.Human Resources..... 90
1.2.Physical Resources..... 92
1.3.Knowledge Resources 93
1.4.Capital Resources 93
1.5.Infrastructure 94
2. Demand Conditions..... 96
3. Related and Supporting Industries..... 97
4. Firms Strategy, Structure, and Rivalry 99

BAB V 108
A. Kesimpulan 108
B. Saran 110
DAFTAR PUSTAKA 112
LAMPIRAN..... 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Perjalanan Wisatawan di seluruh dunia tahun 2017 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Daftar Akomodasi (Mutlak dan Tidak Mutlak) 72

Tabel 4.2 Jumlah Wisatawan yang berkunjung ke Pulau Lombok 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 2.1.Porter's *Diamond*.....43

Bagan 4.1 Ruang Lingkup *Halal Tourism* versi Pemerintah Nusa Tenggara Barat.....68

Bagan 4.2. Porter's *Diamond* versi Pulau Lombok.....108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1.1 Investasi Asing bidang Pariwisata tahun 2012-2018 Triwulan Pertama 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada era milenial ini telah berhasil mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan. Kecepatan akses informasi dan komunikasi juga seolah menjadi instrumen pendukung eksistensi globalisasi di segala bidang. Hal tersebut tentu saja berdampak pada gaya hidup atau *lifestyle* individu era kontemporer ini. *Lifestyle* yang semula berpaku hanya kepada gaya berbusana ataupun berkendara kini telah berkembang khususnya aspek pariwisata.

Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan di seluruh dunia hingga mencapai angka pertumbuhan 4,7 % di tahun 2014 dapat menunjukkan bahwa sektor pariwisata telah bertransformasi menjadi salah satu sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia.[1] *United Nations of World Tourism* (UNWTO) dalam *Tourism Towards 2030 Global Overview* bahkan memprediksikan laju perjalanan wisatawan dunia akan tumbuh sebesar 3,3 % di tahun 2030 mendatang. Hal tersebut tentu saja merupakan angka yang cukup besar dan menjanjikan bagi keberlangsungan bidang kepariwisataan dunia. Selain itu, UNWTO *Tourism Highlight* menyebutkan bahwa sebesar 10% GDP Dunia dihasilkan oleh sektor pariwisata dengan 1 dari 10 macam lapangan

[1] Kementerian Pariwisata RI, *Rencana Strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015-2019*, (Jakarta:Kemenpar RI, 2015), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan diciptakan dari sektor tersebut. Sektor pariwisata dunia juga berhasil menyumbangkan sekitar 7 % ekspor dunia.[2] Dari beberapa paparan tersebut, jelas terlihat bahwa sektor kepariwisataan memberikan efek positif dalam perekonomian internasional.

Gambar 1.1 :

Perjalanan Wisatawan di seluruh dunia tahun 2017

Sumber : UNWTO, 2017

Dari gambar di atas menjelaskan jumlah perjalanan wisatawan dunia sebagai bentuk semakin tingginya tingkat eksistensi dunia kepariwisataan. Selain itu, jumlah perjalanan wisatawan dunia juga

[2] UNWTO, "Why Tourism?", diakses pada tanggal 26 April 2018, http://www2.unwto.org/content/why-tourism.html.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpengaruh terhadap tingkat pengeluaran yang dikeluarkan oleh wisatawan yang mana tentunya dapat mempengaruhi perekonomian dunia.

Bidang kepariwisataan memang bukan hal yang baru dalam konteks Hubungan Internasional. Pada tahun 1988, bidang pariwisata telah menduduki peringkat ketiga dalam jajaran sektor ekspor penyumbang devisa dan berhasil menyumbangkan 25 % hasil dari kegiatan perdagangan jasa dunia.[3] Data terbaru tahun 2017, menunjukkan bahwa pariwisata berhasil menyumbang nilai sebesar US$ 1,4 triliun bagi ekspor dunia. Selain itu, 30 % dari jumlah ekspor di bidang jasa berhasil diciptakan oleh sektor pariwisata.[4] Selain itu, hubungan antara bidang pariwisata dan Hubungan Internasional juga dapat dilihat dari kode etik yang terdapat dalam peraturan *World Committee on Tourism*. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa terdapat 10 kode etik yang bertujuan untuk memberikan peran bagi wisatawan untuk turut andil dalam kontribusi positif di bidang perekonomian, sosial, budaya, sekaligus lingkungan. Salah satunya yang terdapat pada Pasal 3 yakni pariwisata sebagai salah satu motor bagi tercapainya *Suistanable Development Goals* (SDGs).[5]

United Nations World Tourism Organization (UNWTO) menggambarkan lebih lanjut mengenai pariwisata era kontemporer ini

---

[3] Mochtar Mas'oed, *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan,* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1994), 111.
[4] UNWTO, "International Tourism 2017", diakses pada tanggal 26 Mei 2018, http://media.unwto.org/content/infographics.html.
[5] UNWTO, Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai *"Modern tourism is closely linked to development and encompasses a growing number of new destinations. These dynamics have turned tourism into key driver for socio-economic progress."* [6] Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa bidang pariwisata di era modern ini telah menjadi fenomena ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada masyarakat.

Dengan melihat besarnya potensi yang ditawarkan dalam bidang kepariwisataan, negara-negara dengan predikat tujuan wisata favorit dunia terus melakukan pengembangan dan pembangunan bidang pariwisatanya. Indonesia sebagai salah satu negara tujuan destinasi wisata dunia sangat menyadari akan potensi tersebut. Mengacu pada visi Deputi Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, yang bertujuan untuk mengembangkan destinasi dan industri pariwisata yang berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah nampaknya telah menjelaskan pandangan pemerintahan kali ini dalam menyikapi dinamika dunia pariwisata internasional yang semakin positif.[7]

Dari data yang dirilis oleh *World Economic Forum* (WEF) dalam *The Travel and Tourism Competitiveness Report* tahun 2017 mengatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-42 secara global dalam bidang pariwisata setelah dua tahun sebelumnya Indonesia masih berada pada posisi ke-50. Sedangkan dalam lingkup regional Asia Tenggara, Indonesia

[6] UNWTO, "Why Tourism?", diakses pada tanggal 26 April 2018, http://www2.unwto.org/content/why-tourism.html.
[7] Kementerian Pariwisata RI, Ibid, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berada di posisi ke-4 tepat di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.[8] Dalam laporan tersebut, dipaparkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan dalam hal sumber daya alam dan harga yang dapat bersaing.

Sektor pariwisata berhasil menjadi sektor yang cukup menjanjikan dalam hal perekonomian nasional dan pengembangan daerah. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia terkait kontribusi penting bidang pembangunan kepariwisataan terhadap PDB Nasional pada periode 2010-2014 mencapai angka 4 % dan berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 10,13 juta jiwa serta menghasilkan devisa nasional sebesar 10 Milyar USD.[9] Sektor Pariwisata memang tidak dipungkiri telah menjadi salah satu sektor perekonomian yang dapat menimbulkan efek *spill-over* ke berbagai bidang ekonomi lainnya. *United Nations World Tourism Organizations* dalam Renstra Kementerian Pariwisata tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa adanya kontribusi positif yang diberikan oleh sektor pariwisata terhadap pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya pilihan destinasi serta investasi pada sektor pariwisata yang dapat mendongkrak pendapatan ekspor, penciptaan lapangan pekerjaan, serta pengembangan usaha dan infrastruktur.[10]

---

[8] World Economic Forum, *The Travel and Tourism Competitiveness Report 2017,* (Jenewa:World Economic Forum Report, 2017), 23.
[9] Kementerian Pariwisata RI, *Rencana Strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015-2019,* (Jakarta:Kemenpar RI, 2015), 6.
[10]Kementerian Pariwisata RI, Ibid, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tingginya nilai penerimaan yang disumbangkan oleh sektor pariwisata bagi perekonomian nasional dapat dijadikan instrumen untuk mencapai pemerataan tingkat pembangunan ekonomi dan pembangunan daerah tertinggal. Efek *spill over* yang ditimbulkan oleh sektor pariwisata berhasil melibatkan *government sector*, *private sector*, serta masyarakat setempat sehingga berdampak baik secara langsung ataupun tidak langsung pada berbagai bidang. Diantara sektor yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan pariwisata yakni agen/biro perjalanan, hotel, bandara, serta restoran. Sedangkan sektor yang secara tidak langsung memiliki keterkaitan dengan sektor pariwisata yakni perbankan dan kehidupan sosial-budaya masyarakat setempat, yang mana dalam keberlangsungannya dibutuhkan kerjasama yang koordinatif antara tiga komponen tersebut. Selain itu, dibutuhkan pemantapan pelayanan dan infrastruktur kepariwisataan untuk menunjang posisi Indonesia dalam kancah internasional.

Potensi-potensi kepariwisataan yang dimiliki oleh Indonesia dapat dikatakan kompleks. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari kekayaan alam dan budaya yang ada di negeri yang heterogen ini. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Republik Indonesia tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa setidaknya terdapat lima keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara tujuan wisata dunia. Salah satunya yakni kekayaan sumber daya alam dan kekayaan budaya. Indonesia memiliki keunggulan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pulau sekitar 13.446 dan luas wilayah laut sebesar 3,1 juta km^2. Selain itu, di Indonesia juga terdapat 1228 etnis suku yang tersebar dari Sabang sampai Merauke serta 746 bahasa dan dialek nusantara.[11] Kekayaan budaya Indonesia tersebut telah diakui oleh *World Cultural Heritage Sites* yang mana hal ini tentu menambah *core value* Indonesia dalam bidang kepariwisataan.

Sebagai bukti keseriusan pengembangan pariwisata Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata mengeluarkan beberapa terobosan baru yang bertujuan untuk menggenjot sektor pariwisata nasional lebih baik lagi. Salah satu langkah yang diambil yakni dengan membentuk tim percepatan pengembangan 10 destinasi wisata baru selain Pulau Bali yang mana ke sepuluh destinasi wisata tersebut tersebar dari ujung Barat wilayah Indonesia sampai ujung Timur Indonesia. 10 Destinasi wisata baru tersebut ialah Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Pulau Seribu (DKI Jakarta), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Wakatobi dan Morotai.[12] Tujuan dibentuknya 10 destinasi wisata baru oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia ialah untuk memunculkan potensi-potensi wisata baru dalam skala besar yang mana

[11] Kementerian Pariwisata RI, Ibid 20.

[12] Dadang Rizki Rathman, Deputi bidang Pengembangan Destinasi dan Investasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata, *Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas 2016-2019,* (disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Pariwisata "Akselerasi Pembangunan Kepariwisataan Dalam Rangka Pencapaian Target 12 Juta Wisman dan 260 Juta Wisnus 2016", Jakarta, 27 Januari 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan berimbas pada pengembangan daerah dan masyarakat sekitar. Selain itu, pengembangan 10 Destinasi wisata baru juga akan dapat berimbas pada peningkatan devisa negara melalui sektor pariwisata.

Selain itu, terobosan kebijakan pariwisata lainnya yang disiapkan oleh Kementerian Pariwisata RI ialah kebijakan *Halal Tourism* atau Pariwisata Halal yang siap diterapkan di 13 daerah di Indonesia seperti di Lombok (Nusa Tenggara Barat), Manado, Sumatera Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Lampung, Sulawesi Selatan, Banten, Pulau Seribu (DKI Jakarta), Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Kementerian Pariwisata mencoba untuk mengembangkan pariwisata halal dalam bentuk empat komponen yakni perhotelan, restoran, biro atau jasa perjalanan wisata, dan spa.[13] Dimana wilayah-wilayah tersebut ditentukan berdasarkan kesiapan faktor sumber daya manusia, produk wisata daerah hingga akomodasi wisata.

Berdasarkan laporan tahunan yang dirilis oleh *Global Muslim Travel Index* (GMTI) pada April tahun 2018, Indonesia menempati posisi ke-2 bersama dengan Uni Emirate Arab dengan berhasil meraih poin sebesar 72.8 dalam berbagai macam indikator *halal tourism.*[14] Hal ini menunjukkan bahwa semakin menjanjikannya potensi pasar pariwisata halal milik Indonesia di mancanegara.

---

[13] Kementerian Pariwisata RI, *Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, (Jakarta:Asdep Litbang Kebijakan Kepariwisataan, 2015), 6.
[14] Mastercard&Crescent Rating, *Global Muslim Travel Index Report 2018*, (Singapura, 2018), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu kawasan yang tergolong dalam 13 destinasi pengembangan *Halal Tourism* ialah Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Eksistensi Pulau Lombok sebagai destinasi wisata halal dimantapkan ketika tahun 2015 lalu pulau ini berhasil meraih kemenangan dalam *World Halal Tourism Award*. Kemenangan tersebut didapatkan dari dua nominasi penghargaan yakni *World's Best Halal Honeymoon Destination* dan *World's Best Halal Tourism Destination*.[15] Selain itu, pulau ini juga termasuk dalam daftar 10 destinasi percepatan pariwisata. Seiring dengan diresmikannya Kawasan Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) oleh Presiden Joko Widodo Pulau Lombok seakan memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi wisatawan maupun investor. Lombok juga menjadi daerah pertama di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah (PERDA) mengenai *Halal Tourism* atau Pariwisata Halal. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) No. 2 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa ruang lingkup pariwisata halal di Lombok meliputi destinasi, pemasaran dan promosi, industri, kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan pembiayaan.[16] Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut semakin meyakinkan bahwa Pulau Lombok menjadi daerah wisata di Indonesia yang patut diperhitungkan dalam perkembangan inovasi kepariwisataan *Halal Tourism.*

---

[15] BPPD Provinsi NTB, "Sabet Tiga Award di World Halal Travel Summit 2015," diakses pada tanggal 26 April 2018, http://bppdntb.com/sabet-tiga-awards-di-world-halal-travel-summit-2015.html#.WuFRwVvbzpI.html.

[16] Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, Bab 2, Pasal 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengingat bahwa *Halal Tourism* termasuk salah satu jenis bisnis yang *high revenue* dan *high opportunity*, maka dibutuhkan dukungan dari berbagai elemen untuk mengembangkan kerangka bisnis sektor pariwisata ini. Salah satunya ialah akan adanya pembangunan dua proyek infrastruktur berbasis syari'ah yang akan dibangun di Lombok yakni Kawasan Mandalika yang berada di Lombok Tengah dan Global Hub Bandar Kayangan di Lombok Utara.[17] Hal ini tentu saja menambah *core value* bagi Pulau Lombok khususnya dalam menguatkan *branding "Halal Tourism"* yang dimilikinya sebagai nilai jual untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara lebih banyak dan lebih luas lagi.

Inovasi *Halal Tourism* dianggap sebagai salah satu potensi unggul yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pengembangan sektor kepariwisataan. *Branding Halal Tourism* yang melekat kuat pada Pulau Lombok tentunya menjadi daya tarik dan salah satu faktor pertimbangan bagi investor-investor untuk turut andil dalam hal pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata lokal daerah Nusa Tenggara Barat. Selain itu, *trend* wisata halal yang semakin menunjukkan angka positif juga menjadi faktor pertimbangan bagi investor-investor asing untuk berinvestasi di *host country*. Berikut disajikan tabel perkembangan investasi asing dari tahun sebelum dan sesudah eksistensi *halal tourism* di Pulau Lombok :

[17] Republika, "NTB Siapkan 2 Proyek Infrastruktur berkonsep Syariah", diakses pada tanggal 26 Mei 2018, http://khazanah.republika.co.id/berita/senggang/bumigora/16/07/14/o9ybv0368-ntb-siapkan-2-proyek-infrastruktur-berkonsep-syariah.html.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.1 :

Investasi Asing bidang Pariwisata tahun 2012-2018 Triwulan pertama

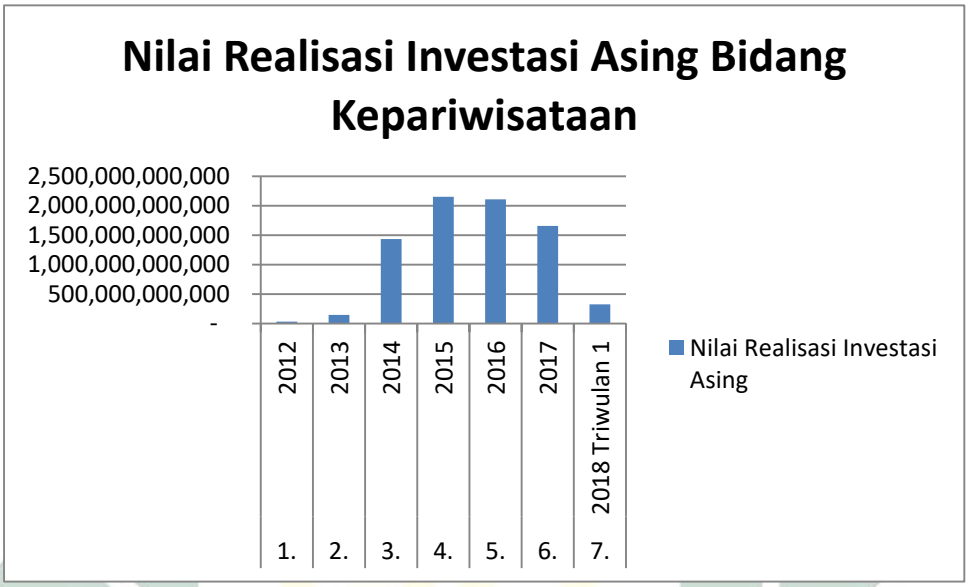

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Provinsi Nusa tenggara Barat.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi nilai investasi asing khususnya pada sektor pariwisata menunjukkan angka yang positif semenjak dimenangkannya *World Halal Tourism Award* tahun 2015 oleh Pulau Lombok yang mana hal tersebut memperkokoh posisi pulau tersebut sebagai destinasi wisata halal favorit di Indonesia. Dari beberapa tahun tersebut, tahun 2017 merupakan tahun yang menarik bagi perkembangan investasi bidang kepariwisataan di Lombok. Pada tahun tersebut, realisasi investasi bidang kepariwisataan didominasi oleh sektor asing dibandingkan sektor dalam negeri sendiri. Dinas Penanaman Modal dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat juga menyebutkan bahwa terdapat 56 proyek yang berasal dari modal dalam negeri dan 687 proyek asing yang masuk ke Nusa Tenggara Barat.[18] Hal tersebut tentu menunjukkan bahwa *halal tourism* memiliki magnet daya tarik tersendiri bagi investor asing untuk turut andil dalam perkembangannya. Hal positif lainnya dapat dilihat dari perkembangan investasi asing pada awal tahun 2018. Dengan jumlah sebesar Rp. 327.910.257.944 termasuk angka yang relatif positif untuk parameter triwulan pertama ditambah dengan jumlah proyek asing sebesar 956 yang tersebar di seluruh wilayah Pulau Lombok menjadikan kebijakan *halal tourism* pada sektor pariwisata menarik untuk dijadikan fokus pembangunan pariwisata baik di tingkat nasional maupun lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti memutuskan untuk meneliti lebih lanjut kebijakan *Halal Tourism* yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkaitan dengan laju perkembangan investasi asing bidang kepariwisataan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang akan menjadi fokus peneliti untuk dijawab selama proses penelitian ini, ialah :

[18] DPM-PTSP Provinsi NTB, *Laporan Realisasi Investasi per Sektor Tahun 2017*, (Mataram, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Apakah yang dimaksud dengan konsep *Halal Tourism* yang diterapkan di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat ?
2. Bagaimanakah model kebijakan *Halal Tourism* yang diterapkan dalam strategi peningkatan *Foreign Direct Investment* bidang kepariwisataan di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi fokus peneliti, tujuan penelitian diuraikan dalam bentuk pernyataan di bawah ini :

1. Untuk mengetahui konsep *Halal Tourism* yang diterapkan di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.
2. Untuk mengetahui model kebijakan *Halal Tourism* yang diterapkan dalam strategi peningkatan *Foreign Direct Investment* bidang kepariwisataan di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.

D. MANFAAT PENELITIAN

Melalui penelitian ini, peneliti sangat berharap dapat memberikan kontribusi dalam bidang akademis maupun praktis :

1. Manfaat Akademis

   Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Hubungan Internasional di era kontemporer ini, khususnya dalam konsentrasi bidang Ekonomi Politik Internasional (EPI). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber rujukan atau referensi kedepannya dalam hal penelitian-penelitian yang sejenis. Penelitian ini juga menjadi sumber

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawasan tambahan bagi peneliti dalam memahami dan mengembangkan ilmu Hubungan Intermasional kontemporer terutama dalam mengkaji kebijakan *Halal Tourism* sebagai strategi peningkatan *Foreign Direct Investment* bidang kepariwisataan di Lombok Nusa Tenggara Barat.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi salah satu sumber masukan bagi beberapa pihak terkait, diantaranya sektor pemerintahan, sektor swasta/pebisnis, dan masyarakat :

a. Menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah lokal Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam perbaikan, pengembangan dan peningkatan *Halal Tourism* sebagai salah satu bentuk kebijakan kepariwisataan yang dapat berpengaruh terhadap laju investasi asing khususnya dalam bidang pariwisata di Pulau Lombok, NTB.
b. Peneliti berharap penelitian iini dapat menjadi tambahan wawasan bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait pengembangan kebijakan *Halal Tourism* yang dapat berpengaruh terhadap investasi asing di Pulau Lombok, NTB.
c. Menjadi salah satu sumber rujukan bagi pihak swasta seperti pebisnis, investor baik asing maupun dalam negeri dalam melihat eksistensi perkembangan *Halal Tourism* yang sedang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlangsung di Pulau Lombok. Sehingga, dapat mempertimbangkan pihaknya untuk turut serta dalam pengembangan di sektor pariwisata setempat.

d. Sebagai salah satu tambahan wawasan bagi masayarakat luas secara umum dan masyarakat setempat Pulau Lombok khususnya agar lebih memperhatikan keberlangsungan serta perkembangan *Halal Tourism* sehingga dapat mengambil peluang positif dari hal tersebut.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Halal Tourism

1.1. Definisi *Halal Tourism*

Halal Tourism secara luas memiliki beberapa sebutan lain seperti *Islamic Tourism* atau Wisata Syariah. Menurut Jafari dan Scott (2014) dalam artikel yang ditulis oeh Mohamed Battour dan Mohd Nazari Ismail menyebutkan pengertian dari *Islamic Tourism* ialah kewajiban-kewajiban bagi wisatawan yang mengunjungi daerah tertentu untuk mentaati persyaratan-persyaratan pariwisata terkait dengan hukum Islam yang berlaku. Disebutkan dalam penjelasannya bahwa hal tersebut berlaku untuk semua wisatawan tanpa memandang asal agama mereka.[19]

Konsep *Halal Tourism* atau Pariwisata Halal sendiri merupakan konsep pariwisata yang memfokuskan pada nilai-nilai syariah islam

[19] Mohamed Battour dan Mohd Nazari Ismail, *Halal Tourism : Concepts, Practises, Challenges, and Future*, Journal of Tourism Management Perspective, (2015): 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam eksistensinya. Ketersediaan makanan halal, fasilitas yang mendukung dalam melakukan ibadah bagi *Muslim Traveler*, ketersediaan air bersih yang mencukupi, adanya pelayanan yang baik di saat bulan Ramadhan, dan tidak adanya aktivitas-aktivitas yang mengganggu dalam hal beribadah dan menjalankan syariat islam, seperti tidak disediakannya minuman-minuman yang dilarang dalam agama Islam, ataupun tempat-tempat semacam diskotik.[20]

World Travel Market (2007) menjelaskan konsep dari *Halal Tourism* ialah tipe kepariwisataan yang agamis yang selaras dengan ajaran Islam dan di dalamnya berkaitan dengan perilaku, pakaian, tingkah laku, dan makanan. Hal ini tentu menyiratkan bahwa wisatawan yang berkunjung ke destinasi daerah pariwisata halal akan secara langsung bersentuhan dengan budaya-budaya Islami yang berlaku.[21]

Ikhsan Arby dalam artikel Wisata Syariah, UMSB menjelaskan bahwa *Halal Tourism* ialah salah satu sistem pariwisata yang diperuntukkan bagi wisatawan muslim yang pelaksanaannya mematuhi aturan syari'ah. Namun, dijelaskannya bahwa *Halal Tourism* tidak hanya diperuntukkan bagi wisatawan muslim saja. Wisatawan Non-Muslim juga dapat turut serta dalam inovasi kepariwisataan tersebut dikarenakan salah satu instrumen *Halal Tourism* ialah penyediaan

[20] Mastercard & Crescent Rating, *Global Muslim Travel Index Report 2016,* (Singapura, 2016), 6.
[21] Mohamed Battour dan Mohd Nazari Ismail, *Halal Tourism : Concepts, Practises, Challenges, and Future*, Journal of Tourism Management Perspective, (2015), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makanan-makanan halal yang pasti terjamin kualitas kesehatan dan kebersihannya.[22]

Menurut Mohamed Battour dan Mohd Nazari Ismail, definisi dari *Halal Tourism* dapat digambarkan dengan *"Halal Tourism is any object or action which is permissible according to Islamic teac*hings *to use or engage by Muslims in tourism industry"*.[23]

Dari beberapa pendefinisian tersebut jelas bahwa penerapan hukum-hukum Islam menjadi intisari dari wisata yang mengusung konsep halal. Diantara konsep tersebut ialah penyediaan hotel yang *familiy friendly*, makanan halal, sampai *halal trips.* Konsep dari *Halal Tourism* sendiri tidak hanya terbatas pada *Muslim Traveler* melainkan berlaku juga untuk Non-Muslim karena melihat inovasi pariwisata tersebut juga menawarkan pelayanan yang maksimal dari segi penginapan hingga makanan yang disajikan dengan standarisasi halal dan terjamin kebersihannya.

1.2.Karakteristik *Halal Tourism*

Crescent Rating dalam *Global Muslim Travel Index* disebutkan beberapa karakteristik yang terdapat pada konsep pariwisata halal atau *Halal Tourism* dan digolongkan ke dalam beberapa kategori yakni ;

[22] Ikhsan Arby, *Wisata Syariah*, Journal Pariwisata Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, (Padang, 2017), 2.
[23] Mohamed Battour dan Mohd Nazari Ismail, *Halal Tourism : Concepts, Practises, Challenges, and Future*, Journal of Tourism Management Perspective, (2015) 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Destinasi kunjungan wisata yang ramah dan aman bagi keluarga. Dalam kategori ini terdapat 3 sub-kategori yakni ; Destinasi yang ramah keluarga, kemanan secara umum maupun khusus bagi wisatawan, dan jumlah kunjungan wisatawan muslim.
b. Destinasi kunjungan wisata dengan fasilitas dan pelayanan yang ramah bagi muslim. Terdapat 4 sub-kategori dalam hal tersebut yakni : terdapatnya jaminan dan pilihan makanan yang halal, kemudahan akses ke tempat ibadah, fasilitas bandar udara, dan terdapatnya pilihan akomodasi.
c. Pemasaran dan kesiagaan dalam destinasi wisata. Dalam kaitannya kategori tersebut, terdapat 4 sub-kategori di dalamnya, yaitu : kemudahan dalam berkomunikasi, kesadaran tentang kebutuhan dari wisatawan muslim dan usaha untuk memenuhinya, konektivitas udara, dan persyaratan visa.[24]

Dari kriteria yang diberikan oleh Global Muslim Travel Index (GMTI) di tahun 2016 tersebut, dapat menjadi acuan bagi peneliti untuk menganalisis lebih jauh lagi mengenai konsep dan kerangka *Halal Tourism* khususnya yang berlangsung di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.

[24] Mastercard & Crescent Rating, *Global Muslim Travel Index Report 2016,* (Singapura, 2016), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Investasi Asing

2.1. Pengertian Investasi Asing

Foreign Direct Investment is defined as an investment reflecting a lasting interest and control by a foreign direct investor, resident in one economy, in an entreprise resident in another country (foreign affiliate).[25] Dari pengertian yang dikeluarkan oleh UNCTAD tersebut, Investasi Asing dapat difahami sebagai bentuk refleksi dari modal serta kontrol oleh pemilik modal baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri yang berafiliasi dengan pemodal luar negeri yang berada pada suatu negara.

Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 Bab I Pasal 1 menyebutkan bahwa penanaman modal asing ialah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.[26] Selain itu, Investasi asing juga dapat didefinisikan sebagai modal yang disediakan oleh penduduk dari suatu negara ke penduduk suatu negara lain.

[25] UNCTAD, *UNCTAD Handbook of Statistics 2017, Fact 9: Foreign Direct Investment*, (New York:UNCTAD, 2017), 1.
[26] Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Bab 1, Pasal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Organization for Economic Development (OECD) dalam *"Foreign Direct Investment for Development"* mengkaitkan perihal investasi asing dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Disebutkannya dalam laporan tersebut bahwa kebanyakan Investasi Asing berpengaruh terhadap tingkat produktivitas dan tingkat pemasukan dari *host-country* lebih dari pencapaian modal dalam negeri itu sendiri.[27]

Penanaman Modal disebutkan oleh Hymer ialah seorang monopolis atau bahkan sering kali oligopolistis pada pasar-pasar produksi suatu negara dimana ia melakukan usahanya. Penanaman modal terutama modal asing dalam suatu negara dapat disikapi secara berbeda oleh *host country.* Setidaknya terdapat tiga teori yang dapat menjelaskan hal tersebut. *Teori Pertama,* yang dipelopori oleh Karl Marx dan Robert Magdoff yang mengatakan bahwa pandangan mengenai investasi asing selalu menghasilkan sikap ketergantungan. Sehingga dalam teori ini jelas menolak akan adanya investasi asing dari *home country.*

Teori Kedua beranggapan bahwa adanya penanaman modal yang memberikan keuntungan yang tidak seimbang dari pihak penanam modal akan membawa dampak buruk bagi si penerima modal itu sendiri. Sehingga keberlangungan modal asing dalam

[27] OECD, *Foreign Direct Investment for Development : Maximising Benefit Minimising Costs,* (Paris:OECD Publication Service, 2002), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu negara akan dibatasi. Penganut faham ini tokoh seperti Stephen Hymer. Sedangkan *Teori Ketiga* yakni teori yang meyakini adanya peranan positif dari penanaman modal asing di suatu negara bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Raymond Vernon merupakan salah satu tokoh yang mempercayai pandangan ini. Adanya pemberian modal, *skill*, transfer teknologi, serta manajemen pengelolaan merupakan instrumen yang dibawa oleh modal asing dari *home country* menuju *host country*.[28]

Dari berbagai definisi mengenai konsep investasi asing tersebut dapat disimpulkan bahwa penanaman modal asing ialah modal yang dikeluarkan oleh pihak asing ataupun pemodal dalam negeri yang turut andil di dalamnya yang ditempatkan di suatu negara yang mana fungsi dari modal asing itu sendiri dapat membantu dalam pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di daerah setempat.

2.2. Jenis Investasi Asing

Investasi Asing yang masuk dalam suatu negara memiliki dua macam jenis, yakni investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*) dan investasi asing dalam bentuk *portfolio*. Investasi asing langsung atau *Foreign Direct Investment* sangat berbeda dengan *portfolio investment.* Dimana FDI memiliki kepemilikian dan kontrol terhadap bisnis internasional di *host country* yang

[28] Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijalankannya. Mengutip Pasal 22 Ayat 3 Perka BKPM No.5 Tahun 2013 disebutkan bahwa batas minimum dana investasi dapat dikatakan sebagai modal asing ialah sebesar 10 Miliar. Di sisi lain, *portfolio invetsment* ialah bentuk investasi asing yang hanya menanamkan modal saja dan menunggu hasil tanpa kontrol atas sebuah bisnis internasional. Sehingga, karakteristik FDI dapat saja dilakukan tanpa entitas MNCs.[29]

F. ARGUMENTASI UTAMA

Dalam penelitian yang berjudul Kebijakan *Halal Tourism* sebagai Strategi Peningkatan *Foreign Direct Investment* bidang kepariwisataan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat memiliki argumentasi utama bahwa Kebijakan *Halal Tourism* yang diterapkan pemerintah Indonesia di Pulau Lombok, khususnya melalui pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki peranan yang penting dalam peningkatan investasi asing bidang kepariwisataan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kebijakan pariwisata yang mendukung keberlangsungan *halal tourism* sebagai bentuk baru proposal bisnis bagi investor asing.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Bentuk dari hasil penelitian yang berjudul Kebijakan *Halal Tourism* Pemerintah Indonesia sebagai strategi peningkatan *Foreign Direct Investment* bidang kepariwisataan di Lombok, Nusa Tenggara Barat

[29] Hukum Online, "Minimal Nilai Investasi Asing 10 Miliar", diakses pada tanggal 22 Juni 2018, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt519360e205742/minimal-nilai-investasi-asing-rp10-m.html.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan disusun menjadi lima bab. Berikut diuraikan sistematika pembahasan pada tiap bab :

1. **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan, akan diuraikan gambaran awal mengenai latar belakang masalah yang hendak diteliti serta sisi penting penelitian sebagai alasan bagi peneliti untuk mengangkat penelitian tersebut. Dalam bab pendahuluan juga dipaparkan rumusan masalah yang akan dicari jawabannya melalui sejumlah penelitian. Selain itu, dalam bab pendahuluan juga menjelaskan mengenai tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Selanjutnya, akan diuraikan definisi konseptual sebagai bentuk untuk menyamakan pengertian dari definisi tiap-tiap variabel yang termasuk dalam penelitian. Dalam bab ini juga menjelaskan mengenai sistematika pembahasan sebagai pedoman dalam runtutan tiap bab yang akan dibahas dalam penelitian. kebijakan *Halal Tourism* dan Investasi Asing yang berlangsung didalamnya.

2. **BAB II KAJIAN TEORITIK**

Pada bab ini tersusun dari kajian pustaka yang berisi mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang masih berkaitan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu amat penting dalam sebuah penelitian guna memberikan gambaran persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Berikutnya, pada bab ini juga akan dipaparkan secara jelas landasan teoritik dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Landasan teoritik digunakan untuk menjawab rumusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah yang sesuai dengan fakta di lapangan. Teori tersebut akan digunakan oleh peneliti sebagai landasan akademis dalam menjawab rumusan masalah yang ada. Dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menerapkan teori yang dicetuskan oleh Michael Porter yakni *Competitive Advantage of Nations.*

3. **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab metodologi penelitian, dipaparkan metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti seperti metode pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, tingkat analisa, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, hingga alur penelitian atau logika penelitian.

4. **BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bab ini, akan disajikan data yang ditemukan selama penelitian berlangsung di lapangan. Data yang disajikan dapat berupa data primer dan data sekunder. Data tersebut dapat disajikan berupa uraian tulisan, tabel dan gambar yang dapat mendukung penelitian. Pada bab ini, akan diuraikan proses pelaksanaan penelitian mulai dari tahap sebelum penelitian hingga tahap setelah dilakukannya pengumpulan data. Berikutnya, akan dijelaskan hasil dari penelitian tersebut secara runtut sesuai dengan rumusan masalah dan fokus penelitian oleh peneliti yakni latar belakang objek penelitian yang meliputi kebijakan *Halal Tourism* di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat dan kaitannya dengan investasi asing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, akan dijelaskan dalam analisis penelitian yang akan dikorelasikan dengan teori yang dipakai oleh peneliti dalam menjawab rumusan masalah. Dalam analisis data tersebut, diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian. Pada analisis data tersebut, peneliti akan mendeskripsikan data hasil temuan nya di lapangan mengenai kebijakan *Halal Tourism* sebagai strategi peningkatan *Foreign Direct Investment* bidang kepariwisataan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, hasil temuan di lapangan akan dianalisa dengan menggunakan teori yang dicetuskan oleh Michael Porter mengenai *Competitive Advantage of Nations.*

5. **BAB V PENUTUP**

Pada bab penutup tersebut peneliti menyajikan kesimpulan atas hasil yang didapatkannya selama di lapangan. Selain itu, dalam bab ini peneliti juga akan memberikan saran bagi perbaikan penelitian-penelitian serupa di waktu mendatang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian mengenai kebijakan *Halal Tourism* di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kebijakan dalam inovasi kepariwisataan *Halal Tourism* yang dapat berdampak pada *Foreign Direct Investment* khususnya di bidang kepariwisataan. Sebagai bahan pembanding dan pelengkap, peneliti menambahkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini. Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi studi kepustakaan peneliti :

1. Skripsi dengan Judul "Kebijakan Pariwisata Halal Sebagai Instrumen Strategi Nation Branding Jepang di Asia Tenggara". Studi Pustaka selanjutnya berasal dari Skripsi jenis kualitatif yang disusun oleh Carina Megarani, Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.[30] Dalam skripsi tersebut Carina membahas tentang peranan *Halal Tourism* sebagai instrumen *Nation Branding* negara Jepang dalam lingkup Asia Tenggara. Skripsi tersebut diangkat karena dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah wisatawan yang berasal dari Asia Tenggara ke Jepang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dijelaskan bahwa kebijakan *Halal Tourism* mulai

[30] Carina Megarani, *"Kebijakan Halal Tourism Pemerintah Jepang sebagai Instrumen Strategi Nation Branding Jepang di Asia Tenggara",* Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, (Yogyakarta, 2016), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberlakukan di Jepang pada era pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe tahun 2013. Hasil penelitian dalam skripsi tersebut menyatakan bahwa pemberlakuan kebijakan *Halal Tourism* sejak pemerintahan Shinzo Abe tersebut dapat meningkatkan perekonomian Jepang. Selain itu, konsep *Halal Tourism* juga mampu menjelaskan *soft-power* Jepang di Asia Tenggara sebagai salah satu negara non-muslim yang ramah terhadap wisatawan muslim. Jika dalam Skripsi karya Carina Megarani memfokuskan penelitian terhadap *Nation Branding* yang dihasilkan oleh kebijakan *Halal Tourism* di Jepang. Penelitian yang akan diangkat oleh peneliti lebih memfokuskan kepada kebijakan *Halal Tourism* yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia di Pulau Lombok yang memiliki *brand* wisata halal sehingga dapat meningkatkan *Foreign Direct Investment*.

Dari kedua penelitian tersebut terdapat persamaan bahwa penelitian tersebut berusaha untuk menjelaskan fenomena *Halal Tourism* dalam lingkup disiplin ilmu Hubungan Internasional. Namun, dalam kedua penelitian tersebut juga terdapat perbedaan pada tujuan penelitiannya, dimana penelitian yang dilakukan oleh Carina Megarani ditujukan untuk menjelaskan konsep *Halal Tourism* sebagai *soft-power* Jepang untuk meningkatkan *Nation Branding* nya sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk menjelaskan konsep *Halal Tourism* sebagai salah satu bentuk strategi pemerintah Indonesia khususnya pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menarik investor asing di Pulau Lombok. Hal tersebut terbukti dengan semakin meningkatnya angka investasi asing dari berbagai negara semenjak diraihnya *World Halal Tourism Award* oleh Pulau Lombok tahun 2015.

2. Skripsi dengan Judul "*Place Branding* dalam Mempertahakan Pulau Lombok sebagai Destinasi Wisata Halal Indonesia". Penelitian yang dilakukan oleh Denda Yulia Asih Rismawanti, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 2016 yang ditujukan untuk memenuhi tugas akhir nya dalam menempuh pendidikan Strata-1 Prodi Ilmu Komunikasi.[31] Jenis penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yang difokuskan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Dalam skripsi tersebut, Denda Yulia Asih Rismawanti, mencoba untuk menjelaskan posisi Pulau Lombok yang telah dikenal sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia semenjak berhasil memenangkan World Halal Travel Summit di tahun 2015 lalu. Denda juga mencoba untuk menjabarkan strategi pemasaran dan promosi yang dilakukan oleh pemerintahan setempat yang mana meliputi *place experience,* pelaksanaan event-event yang menarik wisatawan luar untuk berkunjung, serta menerapkan beberapa peraturan yang mendukung eksistensi wisata halal di Pulau Lombok. Di antaranya seperti sertifikasi halal pada hotel

[31] Denda Yulia Asih, *"Place Branding Dalam Mempertahankan Pulau Lombok Sebagai Destinasi Wisata Halal di Indonesia (Studi Deskriptif Kualitatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nusa Tenggara Barat)",* Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta, 2016), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau restoran terkait dan pembenahan spot-spot wisata yang mendukung keberlangsungan kebijakan *Halal Tourism.*

Segala usaha pemerintahan setempat terkait *Place Branding* Pulau Lombok disebutkan dalam penelitian Denda Yulia Asih Rismawanti menghasilkan hasil yang positif dengan berhasil meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Lombok, NTB. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah membahas mengenai konsep kepariwisataan *Halal Tourism.* Subjek yang diangkat dalam penelitian Denda ialah *Branding* yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mempertahankan Pulau Lombok sebagai destinasi wisata halal di Indonesia. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersifat kualitatif yang mana meneliti kebijakan *Halal Tourism* yang berdampak pada laju *Foreign Direct Investment* di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tujuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Denda Yulia Asih ialah untuk menunjukkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam mempertahankan *branding* Pulau Lombok sebagai destinasi wisata halal favorit khususnya di Indonesia. Di sisi lain, tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah untuk menunjukkan keterkaitan kebijakan *Halal Tourism* yang diterapkan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan tingkat investasi asing yang berada di pulau tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi dengan Judul "Persepsi Konsumen tentang Wisata Syariah dan Pengaruhnya terhadap Minat Berkunjung". Tinjauan pustaka lainnya berasal dari skripsi karya Rizka R di tahun 2016, Mahasiswa Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Lampung. Dalam skripsinya yang mengangkat penelitian jenis kuantitatif, Rizka membahas secara detail mengenai persepsi konsumen atau wisatawan terhadap inovasi Pariwisata Halal yang berdampak pada tingkat minat berkunjung wisatawan.[32] Terdapat hasil yang positif antara variabel persepsi nilai dan persepsi merk terhadap minat berkunjung wisatawan. Dijelaskan dalam hasil penelitian Rizka, keduanya baik variabel persepsi nilai dan merk secara simultan bersama-sama memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan daya tarik kunjungan. Tentu dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya wisata syariah yang merupakan nama lain dari *Halal Tourism* berpengaruh signifikan terhadap minat berkunjung para wisatawan. Meskipun terdapat kesamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan Rizka R yakni berfokus pada variabel kebijakan wisata halal, namun terdapat perbedaan diantara kedua penelitian tersebut. Jika dalam penelitian Rizka R menggunakan jenis penelitian kuantitatif, pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, metode kualitatif dipilih untuk lebih menggambarkan model kebijakan *Halal Tourism* yang memiliki keterkaitan dengan tingkat investasi

[32] Rizka R, *"Persepsi Konsumen Tentang Wisata Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Minat Berkunjung",* Skrispi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, (Bandar Lampung, 2016), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asing. Selain itu, Rizka mengangkat subjek dalam penelitiannya ialah persepsi konsumen mengenai wisata syariah yang berpengaruh terhadap minat wisatawan untuk berkunjung. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, subjek difokuskan pada penerapan kebijakan *Halal Tourism* oleh pemerintah Indonesia khususnya pada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) yang berada di Pulau Lombok.

Dalam penelitiannya, Rizka R menggunakan Teori perilaku konsumen dan persepsi konsumen untuk membantunya dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitiannya sedangkan peneliti menggunakan teori yang menjelaskan titik keunggulan sebuah negara milik Michael Porter yakni Competitive Advantage of Nations. Dari segi tujuan penelitian, kedua penelitian tersebut sudah dapat dibedakan. Jika Rizka R bertujuan untuk menjelaskan pengaruh wisata syariah terhadap minat berkunjung wisatawan ke suatu daerah, maka peneliti melalui penelitiannya bertujuan untuk menjelaskan model kebijakan *Halal Tourism* sebagai strategi untuk menarik investasi asing dalam keikutsertaan pengembangan sektor pariwisata.

4. Jurnal Studi Komunikasi dengan judul “Komodifikasi Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat dalam Promosi Pariwisata Islami di Indonesia”. Jurnal yang ditulis oleh Hafizah Awalia, Mahasiswa Universitas Airlangga Jurusan Studi Ilmu Komunikasi di bulan Maret tahun 2017 ini menggambarkan tentang usaha dari pemerintah sendiri dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menciptakan diskursus "wisata halal" sehingga pada akhirnya hal tersebut akan membawa dampak positif dalam bidang sosial, ekonomi bahkan politik.[33] Pada jurnal tersebut, Hafizah Awalia menggunakan teori sosial *post-modernism* yang dipelopori oleh Foucault dalam melihat komodifikasi *branding* "wisata halal" yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sehingga dominasi pemerintah dalam membentuk *branding* tersebut adalah cara untuk mengendalikan fenomena wisata halal. Dalam fenomena sosial, hal semacam itu merupakan bentuk kontrol penguasa kepada rakyat. Dari jurnal penelitian tersebut, disimpulkan bahwa wisata halal yang dimiliki oleh Pulau Lombok dapat dikatakan sebagai panggung pengontrolan kekuasaan oleh sebagian kalangan *elite* yang memiliki andil dalam terciptanya dan berkembangnya *brand* wisata halal di Pulau dengan sebutan "seribu masjid" tersebut. Kemudian di balik kontrol *elite* tersebut, terdapat tangan-tangan kapitalis atau pemilik modal yang memegang peranan dan kontrol atas keberadaan dan keberlangsungan wisata halal. Sehingga manifestasi produk dan ilmu pengetahuan akan terus menerus secara strukturalis akan dipegang oleh penguasa.

Jurnal komunikasi tersebut memiliki diversifikasi yang jelas dengan posisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dimana penelitian ini, berfokus pada keberadaan kebijakan "wisata halal" sebagai strategi dalam peningkatan investasi asing yang berada di Pulau Lombok, Nusa

[33] Hafizah Awalia, *"Komodifikasi Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat dalam Promosi Pariwisata Islami di Indonesia",* Jurnal Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, (Surabaya, 2017), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tenggara Barat. Keunggulan penelitian ini yakni peneliti berfokus pada realisasi kebijakan *Halal Tourism* sampai dengan teknik operasionalisasi di lapangan yang dapat memberikan efek positif pada laju perkembangan investasi asing khususnya di bidang di Pulau Lombok.

B. COMPETITIVE ADVANTAGE OF NATIONS

Teori yang pertama kali dicetuskan oleh Michael Porter di tahun 1990 ini dapat dikatakan sebagai teori pembaruan dari teori ekonomi klasik *comparative advantage* yang bahkan tergolong tidak tepat lagi untuk menjelaskan daya saing nasional sebuah negara di era globalisasi ini.[34] Porter meyakini bahwa keunggulan sebuah negara diciptakan bukan didapatkan dari warisan atau hal yang turun temurun melainkan dapat diperoleh dari tingkat kreatifitas dan intensitas sebuah negara dalam merumuskan inovasi pada industri nasional.

Dalam teori ekonomi klasik, kemampuan dan keunggulan sebuah negara hanya dipandang dari segi faktor produksi atau faktor *endowments* dari sebuah negara saja. Namun, dalam teori *competitive advantage of nations*, Porter mencoba untuk menggambarkan bahwa keunggulan sebuah negara dapat dicapai dengan inovasi-inovasi terbarukan dari industri itu sendiri untuk meningkatkan kemampuannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, peran pemerintah menjadi penting dalam menciptakan

[34] Binus University, "Competitive Advantage di Indonesia", diakses pada tanggal 14 Mei 2018, https://sbm.binus.ac.id/2016/11/15/competitive-advantage-di-indonesia/.html.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan yang kondusif bagi pelaku usaha dan industri dalam negeri untuk meningkatkan kreativitas dan daya saing mereka. Sebuah industri dapat bersaing secara internasional jika pada lingkup domestik mengalami tekanan dan tantangan sehingga terciptanya inovasi-inovasi terbaru yang dapat menjadi daya tarik unggulan bagi pasar internasional. Seperti halnya tingkat kompetitor industri yang sejenis dan industri pendukung, agresifitas tingkat permintaan dari pasar dan konsumen, serta tingginya permintaan dari *supplier*.[35] Oleh karena itu, setiap negara memiliki keunggulan masing-masing dalam sebuah industri berdasarkan perbedaan kemampuan mereka dalam berinovasi dan meningkatkan kualitas industrinya.

Sebuah negara dapat sukses dalam industri tertentu apabila lingkungan domestik negara tersebut mendukung dalam hal persaingan. Selain itu, lebih khususnya lagi industri-industri tertentu dapat mencapai tingkat kesuksesan mereka dalam persaingan internasional apabila industri tersebut mampu menciptakan teknologi atau strategi baru dalam meningkatkan kualitas mereka dalam pasar internasional. Inovasi terbarukan yang direalisasikan dalam bentuk sebuah desain produk, proses produksi, pemasaran dan promosi, atau model-model pelatihan baru dapat membantu sebuah industri dalam suatu negara untuk lebih kompetitif.

[35] Michael Porter, *The Competitive Advantage of Nations*, Harvard Business Review (Harvard:1990), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara garis besar, Michael Porter dalam "*The Competitive Advantage of Nations with a New Introduction"* menjelaskan bahwa terdapat 4 hal yang dapat mempengaruhi kesuksesan sebuah industri di suatu negara yakni : *Factor Conditions, Demand Conditions, Related and Supporting Industries,* dan *Firm Strategy, Structure, and Rivalry.*[36] Dimana keempat faktor tersebut sering disebut dengan *Porter's Diamond*.

a. *Factor Conditions*

Faktor ini merupakan faktor pertama yang dijelaskan oleh Porter dalam menganalisis kesuksesan sebuah industri. Faktor tersebut menjelaskan bagaimana keadaan dari faktor produksi sebuah negara sebagai modal dasar persaingan industri domestik secara internasional. Ruang lingkup faktor tersebut berbeda dengan faktor produksi pada umumnya yang kita kenal dalam teori perdagangan. Yang mana hanya negara yang memiliki faktor *endowment* saja yang dapat sukses. Lebih luas lagi, Porter menggaris bawahi faktor produksi tersebut bukan merupakan hal yang sudah ada di dalam sebuah negara melainkan negara tersebut berusaha untuk menciptakan faktor tersebut melalui proses yang membedakannya dengan negara lain atau industri lainnya.

Dalam teori Competitive Advantage of Nations, Michael Porter menspesifikasikan *factor of endowments* sebuah negara tidak hanya terbatas pada lahan, modal, dan sumber daya alam saja melainkan pada

[36] Michael Porter, *"The Competitive Advantage of Nations with a New Introduction",* (New York:The Free Press, 1990), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa hal yakni *Human Resources, Physical Resources, Knowledge Resources, Capital Resources,* dan *Infrastructure.*

Kategori pertama yakni *Human Resources* meliputi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, serta etika sumber daya manusia atau pegawai dalam bekerja. Sumber daya manusia menjadi salah satu instrumen penting dalam kompetisi industri sebuah negara. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dapat menentukan kesiapan negara tersebut dalam hal persaingan dengan negara lain. Semakin tinggi angka kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sebuah negara maka hal tersebut akan mendukung terciptanya lapangan kerja yng kondusif. Peran negara dalam mengontrol kualitas sumber daya manusia sangat dibutuhkan melalui kebijakan-kebijakan yang konstruktif.

Faktor penentu selanjutnya yakni *Physical Resources* yang meliputi faktor-faktor fisik sebuah negara seperti keberlimpahan SDA, kualitas, tingkat aksesibilitas, serta biaya dari lahan, air, dan kandungan mineral sebuah negara.[37] Selain itu, faktor iklim dan lokasi geografi sebuah negara juga dapat menjadi pertimbangan bagi pasar internasional dalam memandang keunggulan sebuah negara. Lokasi negara yang strategis dalam hal pertukaran barang dan jasa serta akses transportasi menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam kategori *physical resources.*

[37] Michael Porter, Ibid, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beralih ke *knowledge resources*, dimana dalam kategori ini termasuk di dalamnya keberadaan ilmuwan atau teknisi di sebuah negara, serta pengetahuan informasi akan pasar barang dan jasa oleh masyarakat. Dari pengelompokan tersebut dapat dikatakan bahwa faktor *knowledge resources* tergantung pada keberadaan instansi pendidikan dan pengetahuan terkait seperti universitas dan institusi penelitian baik milik swasta atau pemerintahan.

Factor endowments versi Michael Porter selanjutnya yakni *capital resources.* Hal tersebut meliputi ketersediaan jumlah modal dalam sebuah industri. Dan faktor yang terakhir yakni faktor *infrastructure*, dimana faktor tersebut meliputi tipe, kualitas, serta pengguna dari infrastruktur tersebut yang dapat memberikan efek bagi tingkat kompetisi sebuah negara. Selain itu, sistem transportasi dan sistem informasi yang tersedia di suatu negara juga dapat digolongkan dalam kategori *infrastructure.*

Dari beberapa faktor tersebut, Michael Porter membaginya dalam dua tingkatan yakni *basic factors* dan *advanced factors.* Sumber daya alam, iklim dan lokasi sebuah negara, serta kategori pekerja (*unskilled/semiskilled* labour) termasuk dalam golongan *basic factors.* Sedangkan yang termasuk dalam kategori *advanced factors* meliputi infrastruktur teknologi informasi, tingkat pendidikan sumber daya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia yang tinggi, serta institusi penelitian baik swasta maupun negara.[38]

b. *Demand Conditions*

Faktor penunjang kondisi nasional selanjutnya yakni *demand conditions.* Faktor tersebut menjelaskan bagaimana kondisi permintaan pasar dalam negeri bagi sebuah industri tertentu yang berpengaruh pada kompetitif nasional sebuah negara. *Home demand conditions* dapat berpengaruh terhadap skala ekonomi suatu negara sehingga hal tersebut juga berdampak pada perkembangan tingkat efisiensi. Berikut ini tiga hal yang termasuk dalam *home demand conditions,* ialah :

1) Sifat dasar kebutuhan konsumen

Yang dimaksud ialah Komposisi dari *home demand dapat* membentuk pola bagaimana sebuah perusahaan menyadari, menginterpretasikan hingga merespon keinginan dari konsumen. Catatan pentingnya ialah sebuah negara dapat mencapai nasional kompetitif nya apabila industri dalam negeri dapat memberikan gambaran yang jelas akan kebutuhan konsumen dibandingkan dengan perusahaan asing yang sejenis.

Sebuah negara juga dapat mencapai *competitive advantage* nya apabila konsumen dalam negeri dapat

[38] Michael Porter, Ibid, 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan tekanan bagi industri lokal untuk selalu berinovasi dengan cepat sehingga dapat mencapai hasil yang lebih dibandingkan industri luar negeri. Perbedaan di antara negara-negara dalam segi sifat dasar permintaan konsumen tersebut yang mempengaruhi sebesar apa keuntungan yang akan diperoleh negara dan industri.

2) Ukuran dan Pola dari *home demand*

Michael J. Enright dalam *The Competitive Advantage of Nations* milik Michael Porter menyebutkan bahwa ukuran dan pola dari *home demand* merupakan hal yang utama dalam *national competitiveness.* Semakin luas target pasar dan konsumen dalam industri apapun maka akan semakin memperbesar pula skala ekonomi yang dimiliki. Skala perekonomian nasional yang luas akan berdampak positif bagi investor untuk lebih agresif dalam hal berinvestasi.[39]

Selain itu, jumlah konsumen independen dalam sebuah negara dapat turut menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi industri dibandingkan dengan jumlah yang hanya terbatas pada satu atau dua konsumen yang mendominasi pasar dalam negeri. Hal tersebut berlaku baik pada industri yang bergerak di bidang jasa atau manufaktur.

[39] Michael Porter, Ibid, 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Internalisasi permintaan dalam negeri

Yang termasuk dalam konteks tersebut ialah *mobile/ multinational local buyers*, apabila konsumen sebuah negara dalam produk atau jasa layanan merupakan mereka yang tergolong memiliki tingkat mobilitas yang tinggi atau yang tergolong MNCs, merupakan satu bentuk nilai tambahan bagi *national advantage.* Konsumen yang memiliki intensitas mobilitas yang tinggi yang mana sering berpergian ke negara lain dapat dijadikan aset atau faktor *home demand* yang penting. Tingkat mobilitas mereka yang tinggi dari suatu negara ke negara lain merupakan bagian dari promosi tidak langsung terhadap pasar internasional.

Hal tersebut juga berlaku pada konsumen yang tergolong MNCs. Promosi sebuah negara akan industrinya secara tidak langsung dapat dicapai melalui kesepakatan MNCs dengan penyuplai di bidang jasa atau produk.

Dari ketiga faktor yang termasuk dalam *demand conditions* tersebut, peneliti menggunakan salah satu diantaranya yakni ukuran dan pola dari *home demand* dalam menganalisis kebijakan *halal tourism* dalam kaitannya dengan investasi asing bidang kepariwisataan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Related and Supporting Industries*

Faktor ketiga yang mempengaruhi kompetitif nasional sebuah negara dalam industri nya ialah keberadaan industri terkait atau industri penyuplai yang dapat menambah dan mendukung kompetitif sebuah industri dalam lingkup internasional. Contoh realitas nya ialah industri otomotif Jepang yang terbilang sukses dalam kompetitif internasional merupakan hasil dari sinergitas antara keberadaan industri penyokong otomotif dan *supplier* yang mendukung dari hulu ke hilir.[40] Selain itu, keberadaan industri terkait juga merupakan hal penting bagi kondisi nasional suatu negara. Industri terkait berfungsi dalam koordinasi serta berbagi aktivitas dalam hal penciptaan *value chain* ketika berkompetisi. Aktivitas yang dapat dibagikan dalam hal tersebut seperti pengembangan teknologi, manufaktur, distribusi, pemasaran, bahkan dalam bidang jasa dan layanan.

Dalam hal tersebut *competitive advantage* dalam industri penyokong (*supplier*) maupun *related industries* dapat diciptakan melalui kebijakan-kebijakan dalam negeri yang mendukung terciptanya kondisi nasional yang kondusif bagi kemajuan dan perkembangan masing-masing industri. Kembali lagi hal tersebut bergantung pada peran pemerintah dalam mengatur dan menciptakan kebijakan yang sejalan dengan tujuan industri terkait.

[40] Michael Porter, Ibid, 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Firm Strategy, Structure, and Rivalry*

Faktor keempat ini merupakan konteks dimana sebuah industri tersebut diciptakan, diatur, dan diorganisasikan oleh pihak-pihak tertentu baik dalam bentuk perorangan maupun kelompok tertentu sehingga membentuk kondisi nasional yang kompetitif. Tingkat persaingan dalam negeri antara industri terkait juga berpengaruh dalam intensitas inovasi yang diciptakan. Semakin banyak industri sejenis yang berada dalam suatu negara, maka tingkat persaingan akan inovasi terbarukan semakin tinggi pula. Peran pembuatan kebijakan sangat penting dalam pengorganisasian dan pengaturan industri terkait sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi perkembangan industri itu sendiri.

Teori *"The Competitive Advantage of Nations"* milik Michael Porter terdiri dari empat faktor yang saling bersinggungan satu sama lain. Dimana dari masing-masing faktor tersebut merupakan atribut nasional yang membentuk lingkungan yang kondusif bagi pemodal asing untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi di sektor-sektor tertentu yang dimiliki oleh negara. Keempat faktor tersebut tergabung dalam satu sistem yang saling berkaitan satu sama lainnya sehingga membentuk sebuah *"diamonds"* yang mana *"diamonds"* tersebut menggambarkan suatu keunggulan sebuah negara. Secara individual ataupun sistem, keempat faktor tersebut sama-sama menciptakan konteks yang mana berpengaruh terhadap pembentukan dan kompetisi sebuah perusahaan pada suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara. Jika digambarkan dalam bentuk bagan, ke-4 faktor tersebut dapat membentuk *"diamonds"* seperti berikut ini :

Bagan 2.1 :
Porter's Diamond

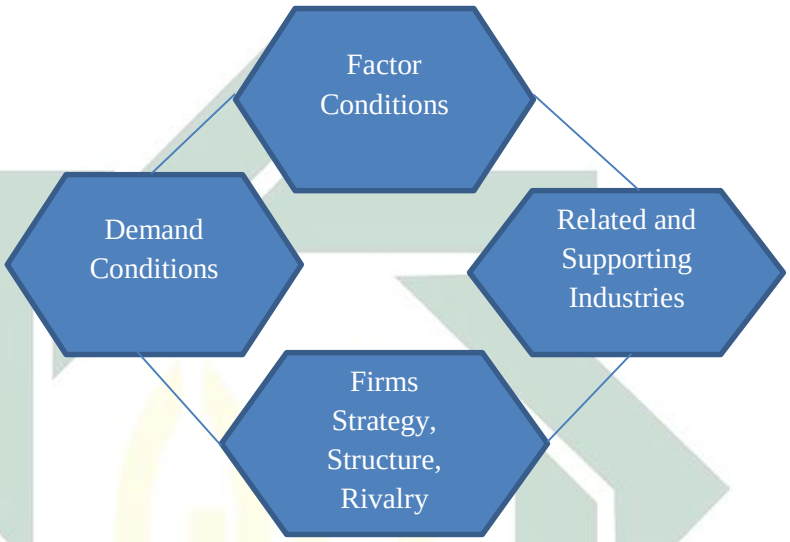

Sumber : Diolah sendiri oleh peneliti berdasarkan Teori Porter

Competitive advantage suatu negara dapat dicapai dari satu atau dua faktor unggul.[41] Dalam teorinya Michael Porter juga menambahkan dua faktor yang tak kalah pentingnya yakni, faktor kesempatan dan peran dari pemerintah.

Industri tertentu yang berhasil tidak terlepas dari adanya kesempatan. Beberapa hal yang termasuk di dalamnya ialah keputusan politik yang diambil dari pemerintahan luar negeri, kondisi perang, pergeseran yang signifikan pada pasar finansial internasional atau dinamika nilai tukar mata uang. Hal-hal tersebut menjadi penting karena dapat menciptakan kondisi yang tidak stabil sehingga menyebabkan

[41] Michael Porter, Ibid, 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pergeseran dari posisi persaingan. Dalam sistem *"diamonds"* yang dimiliki oleh Porter, faktor kesempatan memainkan perannya dengan cara mengubah kondisi dari sistem itu sendiri. Contoh : apabila dalam suatu negara dalam kondisi perang otomatis negara tersebut tidak menawarkan kestabilan politik dalam pemerintahannya sehingga sulit bagi sebuah industri berkembang dan mencapai tingkat keunggulan kompetitifnya.

Selain itu, peran pemerintah menjadi sentral dalam penciptaan lingkungan nasional yang kondusif keunggulan suatu negara dalam ekonomi. Bahkan Porter mengatakan peran pemerintah menjadi variabel akhir yang menentukan keunggulan kompetitif sebuah negara.[42] Peran tersebut dapat dilihat dari bagaimana pola dari kebijakan-kebijakan yang bersifat mengatur masing-masing keempat faktor penentu. Posisi pemerintah dapat saja berpengaruh atau sebaliknya dipengaruhi oleh keempat faktor tersebut baik positif atau negatif. Faktor kondisi sangat dipengaruhi dengan adanya subsidi pemerintah, kebijakan-kebijakan terhadap pasar modal, kebijakan dalam bidang pendidikan dan lain sebagainya. Sedangkan pada tingkat *demand conditions*, pemerintah memainkan peran dalam membentuk standar produk lokal atau regulasi yang memberikan mandat dan mempengaruhi kebutuhan dari konsumen melalui badan-badan pemerintahan yang terkait. Selain itu, pemerintah juga seringkali menjadi konsumen yang berskala besar dalam

[42] Michael Porter, Ibid, 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membelanjakan produk seperti alat-alat pertahanan, komunikasi, hingga alat transportasi.

Pada tingkat *related & supporting industries*, pemerintah berperan dalam membentuk situasi yang kembali lagi berpengaruh terhadap keduanya. Sebagai contoh pemerintah mengontrol bentuk-bentuk iklan media atau regulasi yang berhubungan dengan pelayanan yang mendukung. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam faktor strategi perusahaan, struktur, serta tingkat rivalitas. Hal tersebut dapat dilakukan melalui regulasi pasar modal, kebijakan pajak, atau undang-undang yang menentang penggabungan industri-industri.

Pemerintah memiliki pengaruh yang penting dalam keunggulan suatu negara terlebih lagi perannya tidak dapat dianggap remeh. Sukses tidaknya sebuah kebijakan yang dikeluarkan tergantung pada kecerdikan pemerintah dalam melihat potensi keunggulan yang dimiliki. Sebuah kebijakan akan sukses diterapkan dalam sebuah industri apabila berdasarkan pada keberadaan keunggulan kompetitif dari sebuah negara dan pemerintah mampu untuk memperkuat hal tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Dalam kaitannya dengan penelitian kebijakan *halal tourism* sebagai strategi peningkatan *foreign direct investment* bidang kepariwisataan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian jenis kualitatif sendiri, tergolong jenis penelitian yang baru dimana hal tersebut berlandaskan pada faham post-positivistik yang mempercayai adanya maksud dibalik hal yang tidak terlihat.[43] Sedangkan penelitian kualitatif deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena internasional yang dinamis.

Penelitian kualitatif deskriptif mengenai kebijakan *halal tourism* di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat dan kaitannya dengan investasi asing mendeskripsikan mengenai model-model kebijakan pariwisata dalam lingkup "wisata halal" yang dibantu dengan menggunakan teori *competitive advantage of nations* oleh Michael Porter sebagai landasan akademis untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

Dalam hal ini, peneliti memutuskan untuk terjun langsung ke lapangan guna pengumpulan data-data yang berkaitan dengan *halal*

[43] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2010), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tourism. Peneliti juga berperan aktif sebagai partisipan dalam penelitian ini. Tingkat analisis dalam penelitian ini berada pada tingkat korelasionis yang mendeskripsikan hubungan antara kebijakan *halal tourism* dengan keberadaan investasi asing sektor pariwisata. Objek penelitian ditujukan pada kebijakan *halal tourism* yang berkaitan dengan peningkatan investasi asing di pulau seribu masjid. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan yang terkait dengan kebijakan *halal tourism* di Lombok, Nusa Tenggara Barat sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai macam sumber yang valid.

B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Lokasi penelitian dilaksanakan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lebih khususnya peneliti akan memfokuskan lokasi penelitian pada instansi yang berhubungan dengan *halal tourism* dan investasi asing, seperti : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada kisaran bulan April sampai bulan Juli tahun 2018.

C. PEMILIHAN SUBYEK PENELITIAN

Subyek penelitian ialah narasumber yang akan dimintai keterangannya oleh peneliti terkait dengan fokus penelitian yang diambil. Subyek penelitian dalam jenis penelitian apapun menjadi hal yang sentral karena melalui subyek penelitian segala jenis data yang dibutuhkan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjawab rumusan masalah akan ditemukan jawabannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi. Oleh karena itu, segala ucapan bahkan tindak laku seorang informan dapat dijadikan sebagai data dalam penelitian. Pemilihan subyek penelitian dilakukan dengan salah satu teknik *Nonprobability Sampling* yakni *snowball sampling*. Teknik *Snowball* dalam Sugiyono (2010) dijelaskan sebagai teknik pengambilan *sample* yang semula berjumlah kecil namun lama-kelamaan akan bertambah banyak ibarat bola salju.[44] Hal ini dapat meminimalisir adanya tingkat subyektifitas pada setiap informan. Sehingga dalam penelitian dapat menghasilkan hasil yang menyeluruh dan obyektif.

Subjek penelitian dalam perihal kebijakan *halal tourism* dan kaitannya dengan investasi asing ini difokuskan pada beberapa aktor yang dianggap memiliki informasi yang relevan dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Subjek penelitian yang dimaksud di antaranya ialah Pemerintah Provinsi Daerah Nusa Tenggara Barat baik *state-actor* ataupun *non-state actor* yang kemudian diintegrasikan ke dalam beberapa pihak terkait seperti Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Nusa Tenggara Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Dinas Budaya dan

[44] Sugiyono, Ibid, 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah hingga sektor swasta seperti Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) kawasan Nusa Tenggara Barat.

Pada Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Nusa Tenggara Barat, subyek penelitian diwakilkan oleh Bapak Haris selaku anggota dari Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, pada sektor Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) subyek penelitian difokuskan pada Bapak Taufan Rahmadi yang mana menjadi *pioneer* dalam eksistensi inovasi *halal tourism* di Lombok, Nusa Tenggara Barat ketika menjabat Kepala BPPD periode 2014-2017. Bapak Taufan Rahmadi dapat diklasifikasikan pada subyek penelitian *state-actor* ataupun *nonstate-actor*. Hal ini dikarenakan meskipun beliau sudah tidak menjabat dalam posisi pemerintahan apapun di Provinsi Nusa Tenggara Barat namun beliau tergolong Praktisi *Tourism Creative Strategy* yang diperlukan saran dan idenya dalam pengembangan sektor pariwisata.

Non-state actor selanjutnya berasal dari Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia wilayah Nusa Tenggara Barat yang sekaligus menjadi pengacara yakni Bapak Ainuddin. Selain melakukan penelitian pada ketiga subyek tersebut, peneliti juga melakukan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam kunjungan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat, peneliti diarahkan untuk menghadap ke bagian pengendalian modal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. TAHAP-TAHAP PENELITIAN

Tahap-tahap penelitian ini dibagi menjadi 4 tahapan sesuai dengan konsep yang dicanangkan oleh Kirk dan Miler, yakni : tahap *invention, discovery, interpretation,* dan *conclusion.* Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tahap penelitian dengan judul "Kebijakan *Halal Tourism* sebagai Strategi Peningkatan *Foreign Direct Investment* bidang Kepariwisataan di Lombok, Nusa Tenggara Barat", peneliti akan menguraikannya seperti berikut ini :

1. *Invention* (tahap pra-lapangan)

Tahap pra-lapangan merupakan gambaran awal mengenai fenomena atau gejala sosial yang akan diteliti. Dalam tahapan ini, peneliti berusaha untuk menggumpulkan data-data awal yang nantinya akan dikonfirmasikan langsung kepada pihak yang terkait ketika terjun ke lapangan.

Tahapan ini dilakukan sejak dimulainya pengumpulan data sebelum terjun ke lapangan sebagai langkah awal pengumpulan informasi penelitian terkait kebijakan *halal tourism* sebagai strategi peningkatan *foreign direct investment* bidang kepariwisataan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Berikut ini tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti pada tahap pra-lapangan :

a. Menyusun rancangan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menentukan lokasi penelitian lapangan.
c. Mengurus surat izin penelitian lapangan pada akademik fakultas.
d. Memperhatikan dan menilai kondisi sekitar lapangan penelitian.
e. Memilih tiap-tiap informasi yang didapatkan dari lapangan.
f. Menyiapkan alat-alat pendukung penelitian lapangan seperti alat tulis, data sekunder, serta recorder pada handphone.

2. *Discovery* (tahap penelitian lapangan)

Tahapan *discovery* ialah tahapan dimana peneliti langsung terjun ke lapangan yang bertujuan untuk mengamati dan memperhatikan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, peneliti melakukan tahapan *discovery* yakni pengumpulan data berupa wawancara di tempat yang berbeda yang disesuaikan dengan lokasi informan terkait.

Peneliti melakukan pengumpulan data berupa wawancara ke sejumlah pihak berdasarkan rekomendasi dari informan-informan sbelumnya. Informan-informan tersebut dianggap memiliki kapabilitas pengetahuan dalam kebijakan *halal tourism* di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wawancara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan berdasarkan *snowball* sampling yang menekankan bahwa informan selanjutnya didapatkan atas rekomendasi dari informan-informan sebelumnya. Berawal dari Bapak Taufan Rahmadi sebagai *key informant* kemudian atas rekomendasi Bapak Taufan Rahmadi, wawancara dilanjutkan terhadap Bapak Haris selaku anggota Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Informan selanjutnya yakni Bapak Ainuddin selaku Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia wilayah Nusa Tenggara Barat yang sekaligus berprofesi sebagai pengacara dan sering mengadakan pertemuan dengan para investor asing.

Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian ialah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, keterlibatan dan partisipasi peneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan sangat dibutuhkan untuk menentukan fokus penelitian, pemilihan informan, pengumpulan data, analisis data, menafsirkan data serta membuat kesimpulan atas hasil temuannya di lapangan.[45] Pada tahapan ini diterapkan wawancara mendalam serta dokumentasi berupa data tulisan atau gambar. Kemudian peneliti mencatat nya dengan cermat baik berupa argumen atau tanggapan informan mengenai penelitian kebijakan *halal tourism* dan

[45] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2010), 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaitannya dengan investasi asing di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Pada awal penelitian lapangan, peneliti mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya bagian pengendalian modal untuk mengkonfirmasi dan memastikan data yang dimiliki oleh peneliti terkait nilai investasi asing bidang kepariwisataan sebelum dan sesudah eksistensi kebijakan *halal tourism* di Pulau Lombok dengan data resmi yang dimiliki oleh dinas. Proses penelitian lapangan kemudian dilanjutkan dengan wawancara terhadap beberapa informan terkait.

3. *Interpretation* (tahap analisis data)

Setelah tahapan penelitian lapangan, peneliti memasuki tahapan analisis data yang diperoleh selama penelitian berlangsung ataupun selama peneliti berada pada lokasi penelitian. Data yang diperoleh baik melalui teknik dokumentasi atau wawancara dianalisis dan digolongkan berdasarkan fokus penelitian terkait kebijakan *halal tourism* di Pulau Lombok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Conclusion* (tahap penyelesaian/penulisan laporan)

Tahapan yang terakhir yakni pada penulisan dan penyelesaian laporan. Tahapan ini dilakukan ketika peneliti telah selesai menganalisis data yang berhasil dikumpulkan dan mengklasifikasikannya dengan data yang sesuai terhadap fokus penelitian yakni kebijakan *halal tourism* dan kaitannya dengan investasi asing. Pada proses penulisan dan penyelesaian laporan, peneliti akan mengacu pada pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh prodi. Laporan diselesaikan berdasarkan pedoman agar kualitas laporan baik. Pada tahapan ini, peran peneliti dalam penulisan laporan menjadi penting terhadap hasil akhir laporan penelitian.

Adapun tahapan yang dilakukan pada proses penyelesaian dan penulisan laporan, ialah:

a. Menyusun kerangka laporan hasil penelitian.
b. Menyusun laporan penelitian atas dasar saran dan bimbingan oleh Dosen Pembimbing.
c. Ujian pertanggung jawaban laporan penelitian kepada dosen penguji.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pada penelitian ini, peneliti akan mengaplikasikan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara terhadap sejumlah informan sedangkan data sekunder didapatkan melalui pencarian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data di situs-situs resmi pemerintahan terkait. Teknik wawancara dan dokumentasi dipilih sebagai teknik pengumpulan data.

1. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data yang dikumpukan melalui wawancara terhadap *key person* atau yang menjadi informan atau responden dalam penelitian yang diajukan dalam bentuk pertanyaan yang berkenaan dengan fokus penelitian.[46] Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*). Teknik ini digunakan bertujuan agar peneliti dapat meneliti lebih mendalam tentang subyek yang akan diteliti.[47] Sehingga untuk mendapatkan gambaran-gambaran permasalahan yang lengkap, peneliti harus melakukan proses wawancara terhadap subyek-subyek yang mampu merepresentasikan fokus penelitian yang menjadi titik permasalahan.

Dalam teknik wawancara tidak terstruktur peneliti tidak dapat memprediksikan dengan pasti mengenai jawaban apa yang akan ditemukan di lapangan, apakah sesuai dengan permasalahan yang dari awal ditetapkan oleh peneliti ataupun tidak. Oleh karena itu, dalam teknik wawancara tidak terstruktur ini, peneliti akan lebih banyak mendengarkan informasi-informasi yang diceritakan oleh informan. Setelah itu, peneliti dapat menganalisis dari setiap jawaban yang

[46] Chalid Narbuka dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta:BumiAksara, 2003), 83.
[47] Sugiyono, Ibid, 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diceritakan oleh informan sehingga peneliti pun juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar permasalahan yang terjadi di lapangan.

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara tidak terstruktur diharapkan peneliti akan mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari subyek-subyek yang kompeten mengenai konsep *Halal Tourism* dan keberadaan investasi asing di dalamnya.

Wawancara pada informan pertama, Bapak Taufan Rahmadi selaku mantan Kepala BPPD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Mei 2018 bertempat di Rumah Makan milik keluarga beliau di Jalan Pelikan No.6, Pajang, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Wawancara dilakukan dengan durasi waktu sekitar ± 45 menit, yakni mulai pukul 14.15-15.00 WITA.

Wawancara kedua dilakukan melalui sambungan telepon kepada informan kedua yakni Bapak Haris selaku salah satu anggota Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini dilakukan karena informan lebih menyarankan peneliti untuk melakukan sesi tanya jawab hanya melalui telepon saja. Wawancara melalui sambungan telepon dilakukan pada tanggal 02 Juli 2018 tepatnya pada pukul 19.00 WIB dimana wawancara tersebut berlangsung selama ± 50 menit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara ketiga juga dilakukan melalui sambungan telepon kepada Bapak Ainuddin yang merupakan Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia wilayah Nusa Tenggara Barat. Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 28 Juli 2018 dengan durasi wawancara selama ± 35 menit. Wawancara dimulai pada pukul 10.45 sampai pukul 11.20 WIB.

2. Dokumentasi

Selain wawancara tidak terstruktur, teknik pengumpulan data melalui dokumentasi juga dilakukan pada penelitian ini. Metode dokumentasi merupakan metode bantu atau dapat dikatakan sebagai data sekunder dalam upaya memperoleh data terkait penelitian kebijakan *halal tourism* ini. Metode dokumentasi juga diartikan sebagai kejadian-kejadian atau peristiwa tertentu yang dapat dijadikan atau dipakai untuk menjelaskan situasi yang didokumentasikan oleh peneliti.[48] Tujuannya ialah untuk melengkapi dan menguatkan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan. Data yang dihasilkan dari metode dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, angka bahkan grafik.

[48] Irwan Suhartono, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung:Remaja Rosda Karya, 1996), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Suharsimi Arikunto dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel atau catatan transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda dan lain-lain.[49]

Metode dokumentasi dilakukan oleh peneliti tepatnya di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Udayana No.4, Selaparang, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selain pada kantor DPM-PTSP Provinsi Nusa Tenggara Barat, peneliti juga melakukan pengumpulan data berupa gambar pada Pusat Informasi Pariwisata Halal (*Halal Tourism Information Centre*) yang berada satu gedung dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Barat dan letaknya tidak jauh dari kantor DPM-PTSP Provinsi.

F. TEKNIK ANALISIS DATA

Nasution (1998) dalam Sugiyono menyatakan bahwa *"Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian."*[50] Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini, dilakukan sebelum dan sesudah penelitian berlangsung. Berikut ini dijelaskan lebih lanjut mengenai teknik analisis data :

[49] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta:Rhinneka Cipta, 2006), 156-157.
[50] Suiyono, Ibid, 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisis sebelum di lapangan

Sebelum melakukan penelitian langsung di lapangan, peneliti sudah memiliki gambaran tentang apa yang akan diteliti nya di lapangan, namun hal ini bersifat sementara dan bisa jadi akan berkembang setelah di lapangan. Setelah terjun langsung di lapangan, peneliti jenis penelitian kualitatif akan menganalisis data yang didapatkannya. Fokus pada penelitian kualitatif dapat saja berkembang setelah peneliti terjun ke lapangan dan menemukan data.

Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono mengatakan bahwa aktivitas analisis data dalam jenis penelitian kualitatif dilakukan secara intensif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang didapatkan sudah tergolong jenuh.[51] Jika data yang didapatkan dianggap kurang, maka peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi untuk mencapai titik jenuh dalam sebuah informasi.

Dalam penelitian kebijakan *halal tourism* dan kaitannya dengan investasi asing bidang kepariwisataan, peneliti terlebih dahulu melakukan analisis terhadap data yang didapatkannya. Data tersebut berupa file-file dokumentasi atau kajian hasil studi sebelumnya yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

[51] Sugiyono, Ibid, 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis data lapangan model Miles dan Huberman

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti akan mengadopsi teknik analisis data dari Miles dan Huberman yakni dengan melewati berbagai tahapan analisis data seperti : reduksi data (*data reduction)*, penyajian data *(data display)*, dan kesimpulan *(conclusion drawing/verification).*

a. Reduksi data

Reduksi data perlu dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini mengingat data yang akan didapatkan di lapangan sangat banyak. Dalam penelitian kualitatif, reduksi data dapat juga digolongkan dalam tahapan pengelolaan data.

Data yang didapatkan selama pra-lapangan atau ketika terjun di lapangan dikelompokkan dan dipilih sesuai dengan data yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitian ini. Hal-hal pokok dikumpulkan dan dicari tema atau polanya yang sesuai dengan penelitian. Selain itu, peneliti juga rajin melakukan diskusi dengan teman sejawat yang dirasa memenuhi kriteria untuk *sharing* informasi mengenai penelitiannya sehingga ditemukan pola yang sebenarnya. Dengan hal tersebut, akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penyajian Data

Dilanjutkan ke tahapan penyajian data, peneliti akan menjabarkan data yang telah diperoleh selama proses wawancara di lokasi yakni Pulau Lombok dengan uraian teks yang berbentuk naratif. Selain itu, dalam beberapa konteks, data juga disajikan dalam bentuk bagan. Tahapan ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman mengenai informasi yang ada di lapangan.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahapan ketiga yakni tahap penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dapat bersifat sementara jika dalam pengumpulan data selanjutnya bukti yang ditemukan tidak sesuai/valid dengan hasil dari pengumpulan data selanjutnya. Namun, apabila bukti-bukti yang didapatkan sesuai dengan kesimpulan awal penelitian, maka dapat dikatakan bahwa penarikan kesimpulan terbilang valid sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang dikemukakan pada awal penelitian. Dalam penelitian kualitatif, hasil dari penelitian selama di lapangan disajikan dalam bentuk narasi yang ringkas dan jelas. Hal ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang lebih berfokus pada angka dalam menjelaskan hasil penelitian yang dilakukannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. TEKNIK PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA

Data yang dinyatakan valid dalam penelitian kualitatif ialah apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.[52] Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi :

1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti peneliti meningkatkan pengamatan dengan lebih cermat dan teliti. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat dicatat secara pasti dan sistematis. Dalam kaitannya dengan penelitian ini ialah mengamati kebijakan tertentu.

Ketekunan pengamatan dirasa amat perlu untuk memastikan data yang diperoleh berupa kebenaran. Dalam ketekunan pengamatan ini, peneliti selama kurun waktu ± 3 bulan yakni sekitar bulan April sampai dengan bulan Juli tahun 2018. Ketekunan pengamatan dilakukan pada saat memasuki lapangan dan di luar lapangan. Pada saat memasuki lapangan, peneliti meningkatkan kecermatan dan ketelitian dengan cara memperhatikan dengan seksama segala ucapan, argumen, dan tingkah laku informan sebagai bahan untuk menganalisis. Selain ketekunan pengamatan selama penelitian di lapangan, peneliti juga meningkatkan ketekunan pengamatan terhadap

[52] Sugiyono, Ibid, 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data-data sekunder yang diperoleh dengan memahami kembali dokumen-dokumen resmi yang menjadi rujukan peneliti.

2. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas penelitian ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Peneliti menggunakan pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain untuk memastikan sejauh mana temuan-temuan di lapangan benar-benar representatif untuk menjawab rumusan masalah. Oleh karena itu, dilakukan pengecekan data yang dihasilkan dari proses wawancara serta *cross check* terhadap data yang diperoleh dari hasil dokumentasi.

Tujuan dari triangulasi dalam penelitian ini ialah menggabungkan hasil yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan informan terkait yang diperkuat dengan dokumentasi yang telah didapatkan oleh peneliti pada tahapan sebelumnya.

3. Menggunakan bahan referensi

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menambahkan bukti dokumentasi selama wawancara dengan informan berupa foto-foto dan rekaman selama proses wawancara berlangsung. Selain itu, peneliti juga menambahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

outline wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan yang dikirimkan oleh peneliti kepada informan. Teknik tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa data yang didapatkan oleh peneliti selama penelitian di lapangan dapat dipertanggung jawabkan tingkat kredibilitasnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

TINJAUAN MICHAEL PORTER

A. KONSEP *HALAL TOURISM* DI PULAU LOMBOK, NUSA TENGGARA BARAT

1. Definisi Konsep *Halal Tourism* di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat

Pulau Lombok semakin memantapkan posisinya sebagai salah satu destinasi favorit *halal tourism* di Indonesia dengan meraih posisi *The World's Best Halal Tourism* secara berturut-turut selama dua tahun yakni pada tahun 2015 dan 2016. Hal tersebut tentu menjadi suatu pencapaian yang positif bagi keberlangsungan pariwisata halal di pulau yang terkenal dengan julukan pulau seribu masjid tersebut.

Halal Tourism yang dimiliki oleh Pulau Lombok merupakan karakter dasar dari kebiasaan masyarakat sekitar bahkan sebelum dimenangkannya *World Halal Tourism Award* pada tahun 2015 lalu.[53] Kehidupan sehari-hari masyarakat yang erat kaitannya dengan nilai-nilai religius dan budaya sosial setempat merupakan cerminan bahwa Pulau Lombok memiliki modal kuat dalam kategori pariwisata halal. *Halal Tourism* sebagai tipe *family-*

[53] Ainuddin, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat, wawancara oleh peneliti, 28 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

friendly vacation sesuai dengan keadaan Pulau Lombok yang aman dan ramah bagi wisatawan secara individu ataupun kelompok.

Konsep *halal tourism* bagi Pulau Lombok merupakan *halal lifestyle.*[54] Konsep *halal lifestyle* merupakan suatu syari'ah bagi umat muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kategori "halal" didapatkan dari segi kebutuhan dasar mulai dari makanan dan minuman sampai dengan hal-hal kompleks lainnya seperti peraturan memasuki tempat penginapan. Makanan "halal" tidak hanya sekedar waktu disajikan saja melainkan dari proses awal sebelum penyajian sudah harus tergolong halal. Dari segi wisatawan non-muslim, konsep *halal lifestyle* atau *halal services* merupakan hal yang penting juga. Hal tersebut dipandang dari segi jaminan kesehatan dan kebersihan yang akan diperoleh para wisatawan.

Tujuan dari *halal tourism* bukan hanya sebagai kegiatan berlibur ke suatu daerah saja, namun di sisi lain para wisatawan diharapkan dapat memperoleh nilai religius yang melekat pada daerah kunjungan yang terkait dengan wisata halal. Sehingga hal yang didapatkan bukan hanya sekedar pada *entertaining* melainkan juga hal-hal spiritual. Karena pariwisata sebenarnya bukan sebagai hal yang identik dengan *hedonisme* melainkan pariwisata sebagai

[54] Taufan Rahmadi, Praktisi *Tourism Creative Strategy*, wawancara oleh peneliti, 30 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu cara untuk menikmati dan menyadari keagungan Yang Maha Kuasa.[55]

Wisata halal atau *halal tourism* sendiri diartikan dalam ketentuan umum Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 51 tahun 2015, Bab I Pasal 1 Ayat 9 sebagai kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi unsur syari'ah.[56]

Halal Tourism di Pulau Lombok meliputi beberapa kawasan wisata yakni wisata alam, wisata religi, hingga wisata budaya. Dalam destinasi wisata halal tersebut wajib untuk menyediakan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai islami, seperti fasilitas ibadah yang layak dan suci, makanan dan minuman halal, pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata syariah, serta kebersihan sanitasi dan lingkungan.[57]

Selain itu, konsep *halal tourism* di Lombok juga dipandang dari aspek kemudahan aksesibilitas dan amenitas pendukung bagi wisatawan. Misalnya, ketika beribadah tersedianya petunjuk arah kiblat dan tempat wudhu di fasilitas-fasilitas umum, kamar hotel,

[55] Taufan Rahmadi, Praktisi *Tourism Creative Strategy*, wawancara oleh peneliti, 30 Mei 2018.
[56] Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 51 Tahun 2015 Bab I, Pasal , Ayat 9 tentang Wisata Halal.
[57] Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 51 Tahun 2015, Bab III, Pasal 5, Ayat 1, tentang Wisata Halal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai dengan bandara. Informasi akan lokasi masjid terdekat juga termasuk dalam aturan yang diwajibkan oleh pemerintah pusat Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada seluruh pemangku kebijakan sektor pengembangan pariwisata halal di tingkat Kabupaten/Kota. Kebersihan sanitasi dan lingkungan seperti kriteria toilet yang sesuai dengan syari'ah Islam juga termasuk dalam konsep *halal tourism* versi Pulau Lombok dimana toilet yang dimaksud ialah bukan toilet kering.

Konsep *halal lifestyle* juga termasuk dalam peraturan konsumen ketika berada di dalam hotel. Penggunaan pakaian yang sopan dan berperilaku sesuai dengan syari'ah menjadi hal yang wajib bagi pramuwisata. *Halal lifestyle* telah diatur sedemikian rupa oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat baik bagi industri pariwisata halal maupun konvensional. Tujuannya agar industri pariwisata konvensional turut andil dalam menjadikan lingkungan pariwisata di kawasan Nusa Tenggara Barat khususnya Pulau Lombok kondusif bagi para wisatawan. Bagi industri pariwisata konvensional, setidaknya wajib untuk menyediakan hal-hal mendasar bagi wisatawan ataupun pegawai muslimnya. Hal tersebut meliputi arah kiblat di kamar hotel, informasi lokasi masjid terdekat, tempat ibadah bagi wisatawan/karyawan muslim, keterangan mengenai produk halal/tidak halal, tempat wudhu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpisah antara *ikhwan* laki-laki dan perempuan serta sarana pendukung untuk melaksanakan sholat.[58]

2. Ruang Lingkup Kegiatan Usaha *Halal Tourism* di Pulau Lombok

Secara garis besar ruang lingkup konsep *halal tourism* di Pulau Lombok terbagi menjadi 5 macam kegiatan usaha yang mencerminkan nilai-nilai syari'ah dalam pariwisata. 5 macam kegiatan usaha dengan konsep "halal" tersebut dapat digambarkan melalui grafik di bawah ini :

Grafik 4.1. : Ruang Lingkup Kegiatan Usaha *Halal Tourism* versi Pemerintah Nusa Tenggara Barat

Sumber : Diolah sendiri oleh Peneliti

a. Hotel

Untuk mengatur keberadaan hotel-hotel di Lombok agar selaras dengan tujuan Pulau Lombok sebagai destinasi

[58] Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 2 Tahun 2016, Bab V, Pasal 11, Ayat 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halal tourism favorit di Indonesia bahkan mancanegara, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Peraturan Gubernur No. 51 tahun 2015, membagi hotel syari'ah menjadi dua macam hilal. Hotel Syari'ah Hilal 1 yakni hotel yang termasuk dalam penggolongan klasifikasi pertama ini ditujukan pada hotel yang memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syari'ah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim. Sedangkan Hotel Syari'ah Hilal 2 ditujukan bagi hotel yang memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syari'ah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.[59]

Hotel-hotel yang telah lulus dan memenuhi kriteria usaha hotel syari'ah akan mendapatkan sertifikat halal oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI merupakan lembaga sertifikasi yang bertugas untuk menilai bidang-bidang pariwisata agar sesuai dengan nilai-nilai wisata halal di Pulau Lombok.

Selain itu, nuansa islami ketika pertama kali masuk area hotel seperti kaligrafi atau motif bangunan yang bercorak islami hingga aturan pasangan suami-isteri saja

[59] Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 51 tahun 2015 tentang "Wisata Halal", Bab I, Pasal 1, Ayat 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diperbolehkan menempati satu ruang kamar merupakan beberapa gambaran terkait aturan bagi tempat penginapan yang sesuai dengan konsep *halal tourism*.[60]

b. Penyedia makanan dan minuman

Bagi mereka yang tergolong dalam kegiatan usaha penyedia makanan dan minuman, baik meliputi restoran, cafe ataupun jasa boga, wajib menjamin kehalalan makanan/minuman yang disediakan mulai dari proses pengolahan makanan hingga penyediaan. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan sertifikasi "halal" dari Majelis Ulama Indonesia. Jika hal tersebut belum diperoleh, minimal penyedia usaha makanan dan minuman harus mencantumkan tulisan halal atau non-halal sebagai informasi kepada para wisatawan.[61] Selain itu, lingkungan dari kegiatan usaha tersebut harus terjamin kualitas kesehatan dan kebersihannya.

c. Akomodasi

Dari segi akomodasi harus memiliki standar yang syari'ah, standar syari'ah tersebut meliputi 3 hal yakni

[60] Haris, anggota Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, wawancara oleh peneliti, 2 Juli 2018.
[61] Haris, anggota Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, wawancara oleh peneliti, 2 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produk, pelayanan, serta pengelolaan.[62] Ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai 3 hal tersebut diatur dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015, hal yang termasuk dalam ruang lingkup akomodasi meliputi ketersediaan tempat untuk bersuci, kebersihan sanitasi, terdapat fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, tersedianya peralatan bagi beribadah seperti mukena dan sajadah. Selain itu, suasana yang nyaman dan aman untuk keluarga juga termasuk dalam kategori akomodasi wisata halal versi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tujuan Pulau Lombok agar menjadi kiblat inovasi *halal tourism* baik di Indonesia maupun mancanegara memang sangat konsisten direalisasikan oleh pemerintahan setempat. Secara garis besar, hal tersebut dapat dilihat dari standarisasi peraturan akomodasi meliputi tiga hal yakni produk, pelayanan hingga pengelolaan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata halal yang kemudian dibagi menjadi dua kriteria yakni Mutlak (M) dan Tidak Mutlak (TM). Kriteria Mutlak ialah ketentuan dan persyaratan minimal tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel

[62] Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 51 tahun 2015 tentang "Wisata Halal", Bab III, Pasal 6, Ayat 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga dapat diakui sebagai Usaha Hotel Syari'ah dan layak untuk mendapatkan sertifikat "halal" dari Majelis Ulama Indonesia.[63] Berikut tabel untuk penjelasan mengenai contoh akomodasi tersebut :

Tabel 4.1. : Daftar Akomodasi

(Mutlak dan Tidak Mutlak)

No.	Aspek	Unsur	Sub Unsur	M/TM
1.	**Produk**	Toilet	Tersedia Penyekat antara urinoir satu dengan urinoir lainnya untuk menjaga pandangan.	M
		Kamar Tidur Tamu	Tersedia Al-Qur'an.	TM
			Tidak tersedia akses untuk pornografi.	M
		Ruang Karyawan	Tersedia alat untuk bersuci yang baik di kloset karyawan.	TM
		Ruang Ibadah	Ruang ibadah dalam keadaan bersih dan terawat.	M
2.	**Pelayanan**	Kantor Depan	Memberikan Informasi waktu sholat.	M

[63] Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 51 Tahun 2015, Bab I, Pasal, 1, Ayat 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Olahraga dan rekreasi	Instruktur kebugaran dibedakan antara laki-laki dan perempuan.	M
3.	**Pengelolaan**	Manajemen Usaha	Memiliki dan menerapkan Sistem Jaminan Hotel.	M

Sumber : Diolah sendiri oleh Peneliti

d. Spa, sauna dan griya pijat

Masing-masing penyedia jasa layanan spa, sauna maupun griya pijat harus menyediakan tempat yang mendukung untuk beribadah serta tempat perawatan yang terpisah bagi konsumen laki-laki dan wanita. Ruangan bagi pasangan atau *suite room* digunakan khusus bagi pasangan suami-isteri yang sah. Terapi dalam bentuk apapun baik terapi pikiran ataupun terapi fisik tidak diperbolehkan mengarah ke hal-hal yang berbau kemusyrikan. Selain itu, terapis bagi konsumen laki-laki dan perempuan juga disesuaikan. Seperti halnya kegiatan usaha penyedia makanan dan minuman, segala produk yang digunakan dalam perawatan juga harus berlogo halal resmi mulai dari lulur, masker, aroma terapi bahkan bahan-bahan untuk perawatan wajah, rambut, dan kuku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Biro perjalanan wisata

Setiap agen perjalanan wisata harus memahami terlebih dahulu tentang destinasi-destinasi wisata halal yang terdapat di Pulau Lombok. Ketersediaan informasi mengenai paket wisata halal ataupun destinasi wisata halal menjadi langkah berikutnya bagi biro perjalanan wisata halal dalam mendukung *halal tourism* di Pulau Lombok. Selain mengatur biro perjalanan wisata, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mengatur pramuwisata agar relevan dengan eksistensi *halal tourism*. Pramuwisata yang bergerak pada wisata konvensional dan wisata halal memiliki perbedaan yang signifikan pada beberapa hal seperti akhlak dan tata busana. Pramuwisata yang melayani wisata halal harus berakhlak baik, komunikatif, serta mampu memahami dan menjalankan nilai-nilai syari'ah dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, dari segi penampilan, pramuwisata harus berpakaian yang sopan, memenuhi unsur-unsur Islami, serta memahami dengan baik, benar dan menyeluruh mengenai konsep wisata halal.[64]

[64] Ainuddin, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat,wawancara oleh peneliti, 28 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tata Kelola Kebijakan *Halal Tourism* di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.

Tata kelola *Halal Tourism* di Pulau Lombok dilakukan oleh dua macam kelembagaan yakni kelembagaan pemerintah dan non-pemerintah. Dari segi kelembagaan pemerintah meliputi Dinas Budaya dan Pariwisata baik di tingkat Provinsi sampai tingkat Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam lingkup non-pemerintah meliputi ASITA, PHRI, dan HPI.

Adanya kerjasama antara Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan badan sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan standarisasi "halal" bagi kegiatan usaha merupakan bentuk tata kelola antar kelembagaan. Sebagai bentuk realisasi kinerja, pada tahun 2016, MUI telah mengeluarkan sertifikasi dan standarisasi halal bagi 100 hotel dan restoran.[65] Selain itu, koordinasi Dinas Budaya dan Pariwisata dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kapabilitas dalam lingkup pariwisata halal dilakukan dengan menggandeng Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI). Diharapkan dengan adanya koordinasi pada tiap bidang pengembangan dapat memajukan dan memantapkan posisi Pulau Lombok sebagai destinasi wisata halal.

---

[65] Moh. Faozal, *Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat 2017/2018*, Laporan Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, (Mataram, 2017), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Langkah-langkah Pengembangan *Halal Tourism* di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.

Untuk mempertahankan dan mengembangkan pasar wisata halal pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan sekitar 300 hektare lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah untuk dijadikan kawasan "Wisata Halal" yang berupa perhotelan atau fasilitas kepariwisataan yang memenuhi aspek syari'ah Islam. Selain itu, pada tahun 2016 pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan dana alokasi sebesar 1,5 Miliar untuk membuka rute penerbangan internasional yang baru baik dari dan menuju Bandara Internasional Lombok. Hal tersebut diharapkan dapat menyerap wisatawan dalam jumlah yang lebih banyak. Selain itu, langkah pengembangan juga dilakukan ketika tahap promosi. Dalam hal ini, untuk membangkitkan semangat para pengusaha dalam mendukung pariwisata halal di Pulau Lombok, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata, memberikan insentif berupa kemudahan dalam promosi dan penghargaan kepada para pelaku usaha yang bergerak dalam industri pariwisata halal.[66]

Halal tourism di Lombok, Nusa Tenggara Barat, menjadi istimewa dibandingkan dengan *halal tourism* di kawasan-kawasan lain

[66] Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 51 Tahun 2015, Bab IV, Pasal 12, Ayat 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya komitmen kuat oleh pemerintah pusat yang berada langsung di bawah tanggung jawab Kementerian Pariwisata Republik Indonesia sampai dengan tingkat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Arief Yahya sebagai Menteri Pariwisata Republik Indonesia, bertekad untuk memberikan insentif yang lebih dalam hal pengembangan produk-produk wisata daerah seperti *halal tourism*. Tentunya hal ini menjadi semangat tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Daerah Nusa Tenggara Barat beserta jajaran terkait pariwisata untuk mengembangkan dan lebih mempromosikan *halal tourism* menjadi produk pariwisata andalan Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.[67]

Adanya keinginan yang kuat dari Gubernur Nusa Tengara Barat, Tuan Guru Bajang Zainul Majdi dalam menjadikan Pulau Lombok sebagai destinasi *halal tourism* favorit di Indonesia disambut baik oleh pihak-pihak yang terkait dalam hal pariwisata di Pulau tersebut. Pembuatan payung hukum diambil sebagai langkah awal bentuk keseriusan pemerintah provinsi. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 tentang "Wisata Halal" dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang "Pariwisata Halal" dijelaskan secara rinci ruang lingkup produk, pelayanan, pengelolaan hingga pengembangan *halal tourism* di Pulau Lombok. Kemampuan dan komitmen yang kuat dari para pemangku kebijakan khususnya

[67] Taufan Rahmadi, Praktisi *Tourism Creative Strategy*,wawancara oleh peneliti, 30 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam sektor pariwisata di Pulau Lombok menjadikan satu titik keunggulan pariwisata halal di pulau tersebut.

Selain adanya komitmen yang kuat dari pemerintah provinsi, *halal tourism* di Pulau Lombok didukung oleh kebudayaan dan gaya hidup masyarakat setempat yang relevan dengan kategori pariwisata halal. Dengan jumlah mayoritas penduduk beragama Islam sekitar 90 % serta tingkat toleransi yang tinggi antar sesama umat beragama tentu menjadikan perkembangan *halal tourism* lebih kondusif.[68] Menurut informasi yang diperoleh di kawasan *Islamic Centre* Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, jumlah total masjid dan musholla yang ada di Pulau Lombok mencapai angka 5.000 lebih. Hal tersebut tentunya menjadi poin tambahan bagi penguatan *branding* wisata halal di Pulau Lombok. Faktor keistimewaan lainnya yang dimiliki oleh Pulau Lombok sebagai salah satu destinasi unggul *halal tourism* ialah keindahan alam yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan.[69]

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015, setidaknya kawasan wisata alam menjadi salah satu destinasi yang tergolong dalam daftar destinasi wisata halal versi Pulau Lombok selain wisata budaya dan wisata buatan. Beberapa kawasan wisata alam berupa

---

[68] Moh. Faozal, *Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat 2017/2018*, Laporan Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, (Mataram, 2017), 5.
[69] Taufan Rahmadi, Praktisi *Tourism Creative Strategy*, wawancara oleh peneliti, 30 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pantai, gunung, dan air terjun menjadi destinasi andalan wilayah ini seperti Pantai Pink dan Gunung Rinjani yang berada di kawasan Lombok Timur, Tanjung Aan di kawasan Lombok Tengah, serta kawasan tiga-gili di Lombok Utara.

Dari beberapa penjelasan mengenai konsep *halal tourism* di Pulau Lombok tersebut mulai dari definisi, ruang lingkup, hingga langkah-langkah pengembangan menunjukkan bahwa *halal tourism* di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya Pulau Lombok memiliki keistimewaan yang membedakannya dengan daerah-daerah lain yang mengusung konsep pariwisata halal di Indonesia bahkan mancanegara. Ketika di wilayah lain *halal tourism* dikembangkan karena adanya faktor permintaan pasar, namun lain halnya dengan *halal tourism* yang ada di Pulau Lombok. Karakteristik *halal tourism* yang identik dengan spirit keislaman menjadi kebiasaan yang tercermin dalam kehidupan sosial masyarakat Pulau Lombok. Oleh karena itu, konsep "halal" dalam segala sektor merupakan hal yang sudah mendasar dan terbentuk sebelum eksistensi Pulau Lombok sebagai destinasi wisata halal.[70] Hal tersebut menjadi ciri khas yang membedakan Pulau Lombok dengan daerah lain yang mengusung konsep "halal" dalam pariwisatanya.

[70] Ainuddin, Kepala Himpunan Pramuwisata Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat, wawancara oleh peneliti, 28 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. KEBIJAKAN *HALAL TOURISM* SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN *FOREIGN DIRECT INVESTMENT* BIDANG PARIWISATA DI LOMBOK, NUSA TENGGARA BARAT

1. Kebijakan *Halal Tourism* di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat terkait Investasi Asing.

Halal tourism telah menjadi wajah pariwisata baru bagi Pulau Lombok semenjak sukses dalam persaingan *halal travel* baik di Indonesia maupun di lingkup global. Di Indonesia sendiri, industri pariwisata khususnya pariwisata halal memilki potensi yang besar mengingat mayoritas jumlah penduduk Indonesia beragama muslim. Tujuan dari wisata halal bukan hanya dalam hal hiburan melainkan menumbuhkan semangat spiritualitas di setiap kegiatan wisata. Hal tersebut menjadikan wisata halal berbeda dengan wisata konvensional atau wisata religi pada umumnya.

Indonesia merupakan negara yang tergolong positif dalam laju perkembangan wisata halal. Pada tahun 2015, Pulau Lombok mewakili Indonesia keluar sebagai kategori juara umum dalam *World Halal Tourism Award* yang diselenggarakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pada tahun berikutnya yakni tahun 2016, Indonesia menempati peringkat ke-4 dalam laporan *Crescent Rating "Global Muslim Travel Index (GMTI)"*. Hal tersebut mengalami peningkatan dimana pada April tahun 2018, Indonesia berhasil naik dua peringkat dari posisi 4 ke posisi 2. Pencapaian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut menunjukkan potensi dan kemajuan industri "wisata halal" di Indonesia yang salah satunya diwakilkan oleh Pulau Lombok.

Pada setiap daerah tujuan destinasi wisata, pembangunan infrastruktur dibutuhkan dalam menunjang aksesibilitas dan mobilitas wisatawan. Oleh karena itu, selain bertujuan untuk menarik wisatawan asing, *halal tourism* juga berfungsi sebagai produk wisata yang mampu meningkatkan nilai investasi asing khususnya pada sektor penunjang pariwisata.

"Di setiap daerah wisata harus memiliki branding pariwisata. Seperti Bali dengan julukan "Pulau Dewata". Identik dengan agama mayoritas yang mereka anut. Begitu juga dengan kita, sebelum terkenal dengan halal tourism kita sudah memiliki branding sebagai pulau seribu masjid. Ketika berbicara mengenai bisnis, Pulau Lombok menggunakan label "halal" sebagai nilai jual pada investor. Saya meyakini hal ini merupakan bagian dari strategi pemasaran baik yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur atau perluasan pasar."[71]

Kemajuan industri *halal tourism* di Indonesia merupakan salah satu bentuk "*tourism business proposal"* kepada para investor dalam memandang potensi bisnis yang ada di dalamnya.[72] *Halal tourism* sebagai salah satu bentuk kerangka bisnis yang baru memiliki spesialisasi bidang sehingga daya tarik investasi di dalamnya menjadi sangat potensial.

[71] Ainuddin, Kepala Himpunan Pramuwisata Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat, wawancara oleh peneliti, 28 Juli 2018.
[72] Taufan Rahmadi, Praktisi *Tourism Creative Strategy*, wawancara oleh peneliti, 30 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kaitannya dengan investasi, Indonesia memiliki peringkat yang cukup baik dalam rapor *World Bank. Ease of Doing Business* di Indonesia tergolong ramah bagi para investor. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan posisi Indonesia dalam perizinan bisnis. Indonesia berhasil menempati posisi ke 72 di tahun 2018.[73] Angka ini merupakan hasil peningkatan 19 poin dari tahun sebelumnya. Pemangkasan beberapa izin yang dianggap menghambat investasi merupakan salah satu bentuk kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintahan Joko Widodo dalam strategi peningkatan investasi. Selain itu, dalam Laporan *World Economic Forum* (WEF) tahun 2017 mengenai *The Travel and Tourism Competitiveness* menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-60 dunia dalam hal *Business Environment.*[74] Beberapa hal tersebut tentu saja menjadi nilai *plus* yang dipertimbangkan oleh investor ketika hendak berinvestasi di Indonesia.

Dalam lingkup regional daerah, investasi khususnya terkait industri pariwisata halal juga telah diatur oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang "Pariwisata Halal". Kebijakan dalam pengembangan investasi pariwisata halal meliputi pemberian insentif investasi

[73] Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, "Invest Indonesia", diakses pada tanggal 17 Maret 2018, http://www.investindonesia.go.id/.html.
[74] World Economic Forum, *The Travel and Tourism Competitiveness Report 2017,* (Jenewa:World Economic Forum Report, 2017), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan perundang-undangan, peningkatan kemudahan dalam berinvestasi serta peningkatan promosi.

a. Pemberian insentif investasi sesuai perundang-undangan

Salah satu langkah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyokong pengembangan pariwisata halal ialah dengan memberikan keringanan pajak secara gradual bagi investor asing yang menanamkan modal di sektor pariwisata halal. Nominal keringanan pajak kemudian menjadi hak *prerogative* dari masing-masing pimpinan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat baik Walikota maupun Bupati. Selain itu, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat juga memberikan perbaikan pelayanan pajak untuk investasi asing di bidang pariwisata halal.

b. Peningkatan kemudahan dalam berinvestasi

Dalam konteks tersebut, terdapat dua kebijakan yakni mengembangkan debirokratisasi dan deregulasi perizinan pajak yang menghambat proses penanaman modal asing. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zainul Majdi dalam hal ini meminta semua jajaran terkait investasi dan perizinan bisnis untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kooperatif terhadap para investor yang hendak menanamkan modal di industri pariwisata halal.[75]

c. Peningkatan promosi

Peningkatan promosi dilakukan dengan pemberian informasi peluang investasi di kawasan pariwisata. Selain itu, untuk meningkatkan citra Pulau Lombok sebagai destinasi favorit pariwisata halal, peningkatan promosi dalam dan luar negeri dilakukan secara lebih intens oleh pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat secara rutin berkoordinasi dengan *event-event* internasional seperti *Arabian Travel Mart* yang diselenggarakan di Dubai. Agenda dalam acara tersebut mempertemukan antara *buyers* dan *dealers* sekaligus pentas budaya. Selain membidik wisatawan maupun investor asing di kawasan Timur Tengah, Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat juga rutin mengikuti event internasional di kawasan Asia Tenggara dalam rangka meningkatkan citra dan promosi pariwisata halal dalam lingkup regional. Salah satunya ialah *Mata Fair* yang diselenggarakan tiap tahun untuk merayakan hari jadi Kota Kuala Lumpur, Malaysia. Event tersebut menjadi peluang besar bagi keberlanjutan *halal tourism* Indonesia khususnya Pulau Lombok, dikarenakan

[75] Haris, anggota Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, wawancara oleh peneliti, 2 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

event tersebut merupakan pertemuan dari para calon wisatawan muslim yang berasal dari kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura bahkan Brunei Darussalam.[76] Selain itu, menciptakan sinergitas penanaman modal sektor pariwisata dengan sektor lainnya seperti media dan jaringan telekomunikasi.

2. Investasi Asing bidang pariwisata terkait keberadaan *Halal Tourism* di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Pergerakan Investasi Asing setelah kemenangan Pulau Lombok sebagai *World Halal Tourism Destination* dua tahun berturut-turut yakni tahun 2015 dan 2016 menunjukkan hal yang positif dibandingkan tahun sebelum dimenangkannya penghargaan tersebut. Hal tersebut dikarenakan eksistensi Pulau Lombok menjadi semakin baik di dunia kepariwisataan khususnya dalam konteks wisata halal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatat adanya beberapa peningkatan investasi asing yang masuk ke Pulau Lombok.

Sektor Pariwisata menjadi sektor yang paling diminati oleh investor asing pada beberapa tahun terakhir. Hal tersebut terbukti dengan nilai investasi asing di sektor pariwisata yang meningkat

[76] Haris, anggota Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, wawancara oleh peneliti, 2 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari tahun ke tahun. Sektor pariwisata juga memiliki nilai realisasi investasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya seperti perdagangan, pertanian dan industri.

Selain itu, beberapa investasi asing terkait sektor penunjang pariwisata berhasil tercatat masuk ke Pulau Lombok, diantaranya ialah :

a. Sektor Perhotelan ;

Salah satu sektor yang mengalami peningkatan dalam hal investasi asing ialah sektor perhotelan. Hal tersebut karena hotel menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi para wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah. Pada tahun 2014, jumlah hotel berbintang yang tersebar di seluruh kawasan Pulau Lombok mencapai angka 46.[77] Angka tersebut terpantau mengalami peningkatan semenjak dimenangkannya *World Halal Tourism Award* oleh Pulau Lombok pada akhir tahun 2015. Terbukti dengan beberapa kesepakatan yang berhasil dicapai oleh investor asing dengan pihak-pihak terkait pembangunan infrastruktur.

Pada tahun 2016, pihak Badan Promosi Pariwisata Daerah berhasil mengadakan kesepakatan dengan pihak Pullman Hotel, salah satu hotel bintang lima yang berasal

[77] Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Rencana Induk Pariwisata Berkelanjutan Pulau Lombok 2015-2019*, (Mataram, 2015), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Perancis dengan total nilai investasi asing mencapai Rp. 300 Miliar dengan kapasitas 270 kamar hotel.[78] Hal tersebut dibuktikan dengan adanya *Land Utility Development Agreement* oleh pihak terkait sebagai bentuk keseriusan Pullman Hotel untuk berinvestasi di kawasan Pulau Lombok.

Selain itu, Investor asal Dubai yang bekerjasama dengan investor asal Singapura, membangun *Paramount Lombok Resort and Residence* seluas 7,65 hektar dan akan menyediakan 500 kamar dengan investasi senilai Rp. 1,2 triliun.[79] Paramount Hotel merupakan *brand* yang berasal dari Amerika Serikat yang tergabung dalam group Paragon. Sementara itu, Paragon sendiri ialah perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Perusahaan Arab. Oleh karena itu, proses pembangunannya melibatkan investor asal Dubai dan Singapura. Hotel tersebut dijadwalkan akan beroperasi pada akhir tahun 2020. Selain itu, Investor asal Korea Selatan bersama dengan Hartono Group membangun Hotel Royal Tulip dengan kapasitas 198 kamar di kawasan Mandalika.

---

[78] Taufan Rahmadi, Praktisi *Tourism Creative Strategy*, (disampaikan pada Seminar Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Ampel Surabaya, "How The Power of Creative Strategy can bring Lombok to the World?", Surabaya, 13 April 2017).

[79] DPM-PTSP Nusa Tenggara Barat, "Investor Asing antre di Mandalika", Artikel DPM-PTSP NTB, diakses pada tanggal 28 Juli 2018, http://www.investasi-perizinan.ntbprov.go.id/2018/04/23/investor-asing-antre-di-mandalika/.html.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meningkatnya realisasi investasi asing khususnya di sektor perhotelan, diakui oleh Ketua PHRI Nusa Tenggara Barat, HL Abdul Hadi Faishal sebagai hasil dari semakin baiknya predikat pariwisata Pulau Lombok di mata dunia apalagi ditambah dengan *branding* wisata halal yang sudah dikenal luas baik dalam lingkup domestik atau internasional.[80]

b. Sektor Akomodasi ;

Akomodasi menjadi kebutuhan mendasar lainnya bagi wisatawan. Ketersediaan sarana transportasi yang memadai termasuk salah satu hal yang dapat dikategorikan dalam akomodasi. Dibukanya rute penerbangan langsung dari Korea Selatan menuju Bandara Internasional Lombok (BIL) oleh salah satu maskapai penerbangan Korea Selatan yakni *Korean Air* menjadi bukti kuatnya daya tarik pariwisata Lombok. *Korean Air* sendiri membuka rute penerbangan menuju Bandara Internasional Lombok sejak tahun 2017 lalu. Diharapkan dengan adanya rute *direct flight* dari Korea Selatan ke Lombok mempermudah iklim investasi yang masuk dari Korea ke Nusa Tenggara Barat.

[80] Abdul Hadi Faishal, Ketua PHRI NTB dalam DPM-PTSP Nusa Tenggara Barat, "Investor Lima Negara tertarik berinvestasi di NTB", Artikel DPM-PTSP NTB, diakses pada tanggal 28 Juli 2018, http://www.investasi-perizinan.ntbprov.go.id/2018/02/27/investor-lima-negara-tertarik-berinvestasi-di-ntb/.html.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "*Sektor Pariwisata menjadi sektor yang melibatkan banyak sektor. Salah satunya ialah sektor transportasi dan perhubungan. Tidak dipungkiri bahwa dibukanya rute penerbangan dari Korea menuju Lombok menjadi bentuk pemantapan Lombok sebagai destinasi wisata yang mana kita juga terkenal dengan branding wisata halal. Penyambutan wisatawan Korea ketika pertama kali datang di Lombok sangat sesuai dengan konsep wisata halal yakni family-friendly trip yang mengedepankan lingkungan wisata yang aman dan ramah bagi keluarga."* [81]

c. Sektor Infrastruktur Pendukung Lainnya.

Perusahaan Negara asal Perancis yakni *Vinci Grand Project* berkomitmen untuk mengembangkan investasi *Mandalika Street Race Sircuit Cluster* dengan nilai investasi sebesar US$ 950 Juta dan ditargetkan beroperasi pada tahun 2018.[82] Hal tersebut tentunya menambah pilihan destinasi wisata dan meningkatkan kualitas yang ditawarkan oleh Pulau Lombok sebagai destinasi wisata bertaraf internasional mengingat sebelumnya belum ada investasi yang sejenis dengan hal tersebut.

[81] Ainuddin, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia wilayah Nusa Tenggara Barat, wawancara oleh peneliti, 28 Juli 2018.

[82] Taufan Rahmadi, Praktisi *Tourism Creative Strategy*, (disampaikan pada Seminar Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Ampel Surabaya, "How The Power of Creative Strategy can bring Lombok to the World?", Surabaya, 13 April 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. ANALISIS KEBIJAKAN *HALAL TOURISM* DI PULAU LOMBOK SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN INVESTASI ASING BIDANG KEPARIWISATAAN: TINJAUAN TEORI MICHAEL PORTER.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat, investasi asing di bidang kepariwisataan semenjak dimenangkannya *World Halal Tourism Award* di Abu Dhabi tahun 2015 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum eksistensi Pulau Lombok sebagai destinasi favorit *halal tourism.* Angka investasi asing sektor pariwisata yang mengalami peningkatan tersebut dapat menunjukkan tingkat kesuksesan daya tarik industri pariwisata halal di Pulau Lombok.

Jika dilihat berdasarkan tinjauan Michael Porter dalam *The Competitive Advantage of Nations with a New Introduction,* suatu industri tertentu dapat mencapai tingkat kesuksesan apabila industri tersebut mampu menciptakan inovasi-inovasi terbarukan untuk meningkatkan kemampuan industrinya. Porter menambahkan 4 faktor yang membentuk sebuah *"diamonds"* yang digunakan untuk menganalisis kesuksesan sebuah industri, yakni : *factor conditions, demand conditions, related & supporting industries,* serta *firm strategy, structure, rivalry.* Ke-4 faktor tersebut dapat dijadikan analisis terhadap kesuksesan industri pariwisata halal di Pulau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lombok, Nusa Tenggara Barat. Berikut lebih rinci mengenai penjelasannya:

1. *Factor Conditions*

Faktor kondisi dalam teori Porter tidak hanya terbatas pada *factor endowment* yang dimiliki sebuah negara, melainkan dapat diciptakan melalui terobosan-terobosan baru pada beberapa sektor pendukung sebuah industri, seperti : *human resources, physical resources, knowledge resources, capital resources,* dan *infrastructure.*

1.1.Human Resources

Jika dilihat dari segi *human resources, halal tourism* di Pulau Lombok didukung oleh pihak-pihak kreatif yang menjadi pencetus dan pengembang *branding* wisata halal di Pulau Lombok. Mulai dari pembuat kebijakan sampai dengan pelaksana kebijakan selama di lapangan, merupakan orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi dalam pengembangan bidang pariwisata. Selain itu, dalam hal pramuwisata, Dinas Budaya dan Pariwisata setempat berusaha untuk mengoptimalkan fungsi dari pramuwisata untuk menunjang eksistensi *halal tourism* di Pulau Lombok.

Pramuwisata yang melayani paket wisata halal memiliki standard tertentu dalam pelayanan wisatawan seperti minimal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berperilaku dan berkomunikasi sesuai dengan syari'ah Islam mulai dari *greeting*, *guiding*, hingga *ending*.[83] Bukan hanya sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam pariwisata halal saja yang mendapat perhatian khusus, melainkan masyarakat sekitar destinasi pariwisata halal juga mendapatkan sosialisasi khusus oleh Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten/Kota di Pulau Lombok yang bekerjasama dengan Himpunan Pramuwisata Indonesia khususnya wilayah operasi Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut bertujuan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para wisatawan dan masyarakat sekitar destinasi agar dapat mendukung dan memajukan pariwisata halal di Pulau Lombok. Kondisi *skilled labour* di Nusa Tenggara Barat yang berada pada kisaran 261.102 orang atau sekitar 11,57 % dari jumlah angkatan kerja keseluruhan.[84] Jumlah ini terus diusahakan mengalami peningkatan oleh pemerintah setempat dengan menempuh beberapa kebijakan yang konstruktif. Dengan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dari semua sektor yang memadai di bidang pariwisata serta adanya langkah untuk mempersiapkan tiap-tiap SDM yang berkaitan dengan

[83] Haris, anggota Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, wawancara oleh peneliti, 02 Juli 2018.
[84] Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Profil Ketenagakerjaan Tahun 2016*, Laporan, (Mataram, 2016), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pariwisata halal tentunya menjadi keunggulan tersendiri bagi *halal tourism* di Pulau Lombok.

1.2.Physical Resources

Dari segi *physical resources,* Pulau Lombok sebagai destinasi *halal tourism* sangat didukung oleh faktor keindahan alam yang dimilikinya. Keragaman sumber daya alam seperti pantai, gunung, kekayaan alam bawah laut, danau, hingga air terjun menjadi nilai jual pariwisata dari segi fisik di kawasan Pulau Lombok. Dijadikannya kawasan Gunung Rinjani sebagai salah satu Geopark juga menambah daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Keunikan-keunikan lingkungan fisik di Pulau Lombok yang tidak dimiliki oleh wilayah lain dapat menjadi salah satu indikator berkembangnya pulau tersebut sebagai destinasi wisata halal favorit, mengingat salah satu tolak ukur *halal tourism* adalah ketersediaan pengalaman wisata yang unik dari suatu daerah.

Selain itu, kawasan wisata religi yang ada di Pulau Lombok semakin dimantapkan dengan dibangunnya Masjid Mandalika yang berada di sekitar wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada tahun 2017.[85] Hal tersebut bertujuan untuk

[85] Taufan Rahmadi, Praktisi *Tourism Creative Strategy*, (disampaikan pada Seminar Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Ampel Surabaya, "How The Power of Creative Strategy can bring Lombok to the World?", Surabaya, 13 April 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguatkan *branding* wisata halal dan pulau seribu masjid yang dimiliki oleh Pulau Lombok di tengah-tengah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

1.3.Knowledge Resources

Faktor kondisi selanjutnya ialah *knowledge resources.* Keberadaan instansi-instansi yang terkait dengan pariwisata termasuk salah satu kategori di dalam *knowledge resources* versi Porter. Hal tersebut bertujuan dalam hal riset dan pengembangan sektor terkait. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyediakan Politeknik Pariwisata Negeri sebagai langkah untuk menyiapkan sumber daya manusia dengan kualitas baik di bidang pariwisata. Politeknik tersebut telah beroperasi sejak tahun 2016 lalu yang menerima sekitar 200 mahasiswa pada tahun ajaran pertamanya.[86] Lokasi politeknik tersebut berpusat di dua tempat yakni di Kota Mataram dan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.

1.4.Capital Resources

Dari segi *capital resources,* Dinas Budaya dan Pariwisata Nusa Tenggara Barat melalui Bapak Haris sebagai informan mengakui bahwa pihaknya merupakan salah satu jajaran SKPD yang mendapatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah

[86] Taufan Rahmadi, Praktisi *Tourism Creatve Strategy,* wawancara oleh peneliti, 30 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang paling sedikit, namun insentif modal tersebut didukung oleh sektor-sektor terkait pariwisata seperti dalam hal promosi pariwisata, Dinas Budaya dan Pariwisata mendapatkan dana bantuan berupa dana *Corporate Social Responsibility* dari *stakeholder-stakeholder* terkait.

1.5.Infrastructure

Infrastruktur menjadi pelengkap bagi sektor-sektor perekonomian tidak terkecuali bagi sektor pariwisata. Dalam kaitannya dengan *halal tourism,* konektivitas udara, ketersediaan transportasi yang memadai sampai kondisi jalan menjadi perhatian bagi pihak-pihak terkait pengembangan sektor pariwisata baik konvensional atau wisata halal. Dana sebesar 1,5 M dialokasikan untuk pembangunan dan pengembangan rute perjalanan baru, baik dari dan menuju ke Lombok.[87] Pemerintah setempat bersama dengan pemerintah pusat masih berusaha untuk meningkatkan frekuensi konektivitas nasional maupun internasional. Penyediaan *direct flight* ke Lombok yang telah dikenal menjadi destinasi favorit bagi *halal tourism* menjadi hal yang penting bagi aksesibilitas wisatawan terutama dari kawasan Timur Tengah.

[87] Moh. Faozal, *Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat 2017/2018,* Laporan Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, (Mataram, 2017), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejauh ini, terdapat tiga *direct flight* dari dan menuju Bandara Internasional Lombok (BIL) yakni dari Malaysia, Singapura dan Korea Selatan. Salah satu anak perusahaan Singapore Airlines yakni *Silk Air* telah membuka rute penerbangan dari dan menuju Lombok dengan frekuensi 3 kali dalam seminggu. Berbeda dengan Singapura, intensitas penerbangan milik Malaysia, *Air Asia* sebagai penyedia transportasi dari dan menuju Bandara Internasional Lombok dikategorikan lebih rutin yakni 3 kali dalam sehari dan mayoritas penumpang tersebut ialah para wisatawan.[88] Sedangkan, salah satu maskapai penerbangan asal Korea Selatan, *Korean Air* tergolong baru membuka *direct flight* ke Lombok yakni pada akhir bulan Juli tahun 2017.[89]

Selain infrastruktur dari segi transportasi dan konektivitas udara, Porter menilai bahwa sistem informasi yang ada di suatu negara juga menjadi indikator dalam *factor conditions* kategori infrastruktur. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui dinas terkait menyediakan layanan *Tourism Information Centre* di dua lokasi yakni Bandara

[88] Haris, anggota Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, wawancara oleh peneliti, 02 Juli 2018

[89]CNN Indonesia, "Ini Alasan *Korean Air* terbang ke Lombok", diakses pada 28 Juli 2018, https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170731145516-307-231466/ini-alasan-korean-air-terbang-ke-lombok.html.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Internasional Lombok (BIL) dan Pelabuhan Lembar. Diharapkan dengan hal tersebut para wisatawan yang masuk dari berbagai pintu masuk dapat memperoleh informasi dini mengenai tujuan destinasi dan segala hal yang berkaitan dengan wisata di Pulau Lombok.

2. *Demand Conditions*

Dalam teorinya, Porter mengungkapkan bahwa konsumen dalam negeri harus bisa memberikan tekanan bagi industri sehingga tawaran akan inovasi-inovasi produk dapat lebih banyak lagi begitu juga dengan sektor pariwisata. Dalam hal ini, pariwisata halal merupakan hal yang baru bagi industri pariwisata Indonesia, sehingga membutuhkan tahap penyebaran informasi yang lebih luas lagi. Data menunjukkan bahwa keadaan permintaan pasar dalam negeri dan luar negeri terkait pariwisata di Pulau Lombok menunjukkan angka yang positif, hal tersebut dapat digambarkan melalui jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Lombok dalam kurun waktu 2012-2016 yang digambarkan lebih rinci dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.2. :

Jumlah Wisatawan yang berkunjung ke Pulau Lombok

No.	Tahun	Wisman	Wisnus	Jumlah	Perkembangan (%)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.	2012	471.706	691.436	1.162.512	31,15
2.	2013	565.944	791.658	1.357.602	16,72
3.	2014	752.306	876.816	1.629.122	20,00
4.	2015	1.061.292	1.149.235	2.210.527	35,69
5.	2016	1.404.328	1.690.109	3.094.437	39,99

Sumber : Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2017.

3. *Related and supporting industries*

Indikator ke-3 milik Michael Porter menggambarkan keberadaan industri terkait dan industri pendukung yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan berdaya saing global mengingat sektor pariwisata merupakan sektor yang melibatkan berbagai macam sektor ekonomi lainnya. Dalam hal ini, *halal tourism* di Pulau Lombok memiliki beberapa keunggulan terkait keberadaan industri pendukung dan industri terkait, diantaranya ialah :

Industri pendukung terkait informasi dan komunikasi. Salah satu penyedia jasa layanan komunikasi terkemuka di Indonesia, Telkomsel berkoordinasi dengan Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal mempromosikan dan mengembangkan *halal tourism* di Pulau Lombok dengan meluncurkan aplikasi "*Halal Tourism Pesona Lombok Sumbawa"* pada tahun 2017. Layanan aplikasi *"Halal Tourism Pesona Lombok Sumbawa"* berhasil diluncurkan sebagai *guiding*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

information yang praktis bagi para wisatawan di era modern ini mengingat ketersediaan teknologi digital menjadi salah satu indikator wisata halal dalam *Global Muslim travel Index* (GMTI). Hal tersebut dilakukan karena media sosial dianggap menjadi wadah yang tepat untuk menyebarluaskan informasi mengenai eksistensi *halal tourism* di Pulau Lombok secara global dan menyeluruh.

Dari sektor industri pendukung lainnya yakni penyedia makanan dan minuman, saat ini bukan menjadi hal yang sulit lagi untuk menemukan restoran yang sesuai dengan cita rasa wisatawan mancanegara seperti Timur Tengah, Malaysia, bahkan Eropa di kawasan Pulau Lombok.[90] Sama halnya dengan hotel, restoran juga harus mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, setidaknya terdapat 100 hotel dan restoran yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI di tahun 2016.

Berikutnya mengenai industri terkait pariwisata yakni industri perhotelan. Setidaknya terdapat 46 hotel berbintang yang telah beroperasi dan tersebar di seluruh kawasan Pulau Lombok pada tahun 2014.[91] Mengingat eksistensi wisata halal di Pulau Lombok yang dimulai sejak akhir tahun 2015, jumlah hotel tersebut terus

[90] Haris, anggota Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, wawancara oleh peneliti, 02 Juli 2018.
[91] Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Rencana Induk Pariwisata Berkelanjutan Pulau Lombok 2015-2019*, (Mataram, 2015), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertambah. Hal tersebut terbukti dengan beberapa jajaran hotel bintang lima yang telah melaksanakan *groundbreaking* pertamanya di tahun 2017 dan 2018, seperti Pullman Hotel dan Hotel Royal Tulip.

Keberadaan hotel berbintang tersebut penting bagi indikator industri terkait pariwisata halal yang berdaya saing global guna memenuhi kebutuhan dan permintaan wisatawan asing dari seluruh penjuru dunia. Selain itu, dalam kaitannya dengan *halal tourism*, hotel-hotel yang mendeklarasikan sebagai hotel syari'ah di kawasan Pulau Lombok wajib mendapatkan sertifikasi halal dari (DSN-MUI). Bagi hotel yang belum mendapatkan sertifikasi tersebut, minimal mencantumkan konsep-konsep syari'ah pada keberlangsungan pelayanannya.

4. Firm strategy, structure, rivalry

4.1.Firm strategy

Dari segi *firm strategy,* Kesiapan Pulau Lombok sebagai destinasi wisata halal dapat dilihat dari beberapa bentuk strategi kreatif dan inovatif yang diterapkan untuk menyukseskan wisata halal di Lombok.

Selain strategi pemasaran dan peningkatan citra wisata halal Pulau Lombok dengan cara promosi baik di dalam maupun luar negeri, Dinas Budaya dan Pariwisata juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berusaha untuk menciptakan inovasi produk-produk terbaru yang berkaitan dengan *halal tourism*, seperti kerjasama dalam peluncuran paket wisata halal di tahun 2017 oleh *Association of The Indonesian Tours and Travel Agency* (ASITA) wilayah Nusa Tenggara Barat. Dimana pada setiap paket wisata halal baik *half day* atau *full day*, wisatawan diajak untuk berkunjung ke Masjid Hubbul Wathan yang terletak di kawasan *Islamic Centre*, Kota Mataram, wisata budaya Desa Sade, Masjid Kuno Karang Bayan, Air Terjun Benang Kelambu, Gili Nanggu, Gili Kedis dan Gili Sudak.

Beberapa destinasi tersebut jelas mencakup tiga komponen wisata halal sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat terkait pariwisata halal. Selain itu, Dinas Budaya dan Pariwisata juga mengeluarkan paket wisata kurban sejak tahun 2017. Paket wisata kurban bertujuan untuk mengajak para wisatawan yang memiliki kemampuan lebih dalam finansial berkurban di Pulau Lombok. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Haris, anggota Dinas Budaya dan Pariwisata, Nusa Tenggara Barat.

"Paket Wisata Kurban disediakan oleh Disbudpar manakala ada rezeki lebih, wisatawan bisa berlibur sambil berkurban. Hal tersebut menjadikan kunjungan para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wisatawan bukan hanya bertujuan untuk liburan tetapi mencari pahala dan barokah."[92]

Inovasi produk wisata kurban tentu menjadi satu poin plus tambahan bagi keberlangsungan industri pariwisata khususnya *halal tourism.* Selain itu, dalam paket wisata kurban bertujuan juga untuk mengenalkan budaya Suku Sasak dalam berkurban kepada para wisatawan. Wisatawan yang mengambil paket wisata kurban akan dilibatkan mulai dari awal pemilihan hewan kurban, proses transaksi, penyembelihan hewan kurban sampai dengan pembagian daging kurban kepada fakir miskin. Dalam hal ini, Disbudpar setempat bekerjasama dengan pihak Pondok Pesantren terkait untuk membagikan daging kurban dan pemberian ceramah agama setelah kurban.

Berbagai macam produk wisata halal diakui oleh Bapak Haris selaku anggota Disbudpar, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu strategi pengembangan dan langkah mempertahankan *branding* wisata halal di Pulau Lombok. Produk wisata halal selanjutnya ialah, Pesona Khasanah Ramadhan yang diluncurkan sejak tahun 2016. Dalam event tersebut, Disbudpar bekerjasama dengan Rektor Universitas Al-Azhar untuk menghadirkan imam-imam besar dari Timur Tengah seperti Yordania, Mesir, dan Maroko. Imam besar

[92] Haris, anggota Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, wawancara oleh peneliti, 02 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut bertugas dalam mengimami sholat isya' dan tarawih yang dipusatkan di Masjid Hubbul Wathan, *Islamic Centre* selama 30 hari secara bergiliran.

Selain itu, dengan melibatkan *stakeholder* di sektor pariwisata, Disbudpar menyediakan 500 takjil tiap harinya dan 1000 takjil tiap hari Jum'at untuk dibagikan. Parade budaya malam takbiran, seribu cahaya, dan pentas budaya nuansa religi juga termasuk dari beberapa kegiatan yang ada dalam produk wisata halal "Pesona Khasanah Ramadhan".

4.2.Structure

Dari segi *structure*, wisata halal di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat dapat dikatakan baik. Sinergitas dan relevansi pihak-pihak terkait bagi keberlangsungan dan pengembangan *halal tourism* diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 tahun 2015. Keterkaitan yang kompleks antara pemerintah, swasta, dan masyarakat tercermin dalam realisasi operasional di lapangan.

Dari pihak pemerintah pusat yang menjadikan produk wisata halal sebagai prioritas pengembangan wisata di Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut tercermin dalam kuatnya komitmen Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk membangun segala sesuatu yang berkaitan dengan wisata halal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti realisasi KEK Mandalika yang memiliki nilai positif dalam geoekonomi dan geostrategis serta pembangunan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Negeri. Pemerintah Provinsi menyambut baik perhatian khusus dari pemerintah pusat tersebut dengan membuat payung hukum berupa Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah terkait wisata halal. Berikutnya, dinas-dinas terkait sektor pariwisata seperti Disbudpar tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD), bekerja untuk mengoptimalkan keberlangsungan wisata halal di Pulau Lombok.

Peran sektor swasta atau non-kelembagaan juga sentral dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam hal menyukseskan pariwisata halal di Pulau Lombok seperti keterlibatan ASITA, PHRI dan *stakeholder-stakeholder* terkait pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata tidak akan optimal jika peran serta masyarakat tidak dilibatkan di dalamnya. Oleh karena itu, dalam struktur pengembangan pariwisata halal di Pulau Lombok peran masyarakat turut dilibatkan. Keterlibatan masyarakat diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 tahun 2015 meliputi menyediakan fasilitas penunjang wisata halal, mengawasi pelaksanaan wisata halal di daerah mereka, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan saran dan informasi terkait pengembangan wisata halal kepada Pemerintah Daerah setempat.[93]

Terkait dengan daya tarik akan investasi asing di bidang pariwisata, pemerintah provinsi juga berkoordinir dengan Dinas Budaya dan Pariwisata untuk melakukan langkah-langkah progresif dalam upaya peningkatan citra Pulau Lombok sebagai destinasi wisata halal sehingga sinergi antara Disbudpar dengan DPM-PTSP Provinsi/Kabupaten dapat tercapai.

Dalam hal kebijakan terkait investasi di sektor pariwisata halal, Pemerintah Provinsi juga memangkas layanan perizinan dengan melakukan debirokratisasi dan deregulasi.

Debirokratisasi investasi dilakukan melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSA) pada tingkat kabupaten/kota sehingga tidak menghabiskan waktu yang lama bagi kepengurusan investasi.[94] Sedangkan deregulasi dilakukan dengan memangkas beberapa kebijakan terdahulu yang menyulitkan dalam investasi. Selain itu, pemberian insentif pajak terhadap pengusaha di bidang pariwisata halal disesuaikan dengan Dinas dan Kepala Daerah terkait.

---

[93] Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 51 Tahun 2015 tentang Pariwisata Halal, Bab V, Pasal 13, Ayat 3

[94] Haris, anggota Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, wawancara oleh peneliti, 02 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Bupati nya, Fauzan Khalid, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa terdapat beberapa fasilitas kemudahan bagi kegiatan usaha yang bergerak di lingkup pariwisata halal seperti hotel, restoran, dan tempat rekreasi. Hal tersebut meliputi keringanan pajak dan retribusi daerah sebesar 25 % yang diberikan selama jangka waktu 10 tahun.[95]

4.3.*Rivalry*

Selain strategi industri dan struktur, Porter juga menambahkan faktor rivalitas dalam mengukur kesuksesan suatu industri di sebuah negara. Di Indonesia, melalui Kementerian Pariwisata diluncurkan 13 destinasi pariwisata dengan konsep "wisata halal", diantaranya ialah Nanggroe Aceh Darussalam, Pulau Seribu (DKI Jakarta), Lombok (Nusa Tenggara Barat), Manado, Sulawesi Selatan, Riau, Lampung, Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur.[96] Dari ke-13 destinasi wisata halal tersebut, baru terdapat 3 wilayah yang telah siap menyediakan wisata halal yakni Lombok (Nusa Tenggara

[95] Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal, Bab VIII, Pasal 29, Ayat 1.
[96] Kementerian Pariwisata RI, *Kajian Pengembangan Wisata Syariah,* (Jakarta:Asdep Litbang Kebijakan Kepariwisataan, 2015), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barat), Pulau Seribu (DKI Jakarta), dan Nanggroe Aceh Darussalam sehingga tingkat persaingan terbilang monoton. Jika keadaan ini berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang, tentu menghasilkan hal yang kurang baik bagi pengembangan wisata halal. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya perkembangan jumlah rivalitas sehingga tingkat inovasi hanya dapat diukur pada kriteria rivalitas yang monoton.

Dari Teori Michael Porter, *Competitive Advantage of Nations*, dapat dilihat bahwa Pulau Lombok memiliki beberapa faktor unggul dalam hal kesuksesan industri pariwisata halal. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam sebuah sistem kepariwisataan. Keunggulan satu faktor akan memberikan pengaruh terhadap faktor lainnya karena bekerja dalam satu lingkup sistem yang saling berkaitan sehingga membentuk sebuah *"diamonds"*.

Dalam kaitannya dengan *Halal Tourism* yang ada di Pulau Lombok memiliki beberapa faktor keunggulan dari segi *factor conditions, demand conditions, related and supporting industries, firm strategy,* serta *structure.* Keunggulan Pulau Lombok pada *factor conditions* seperti kapabilitas sumber daya manusia yang memadai, infrastruktur yang mendukung, keberlimpahan kekayaan alam, kapasitas modal yang mendukung keberlangsungan pariwisata halal serta keberadaan instansi-instansi terkait riset dan pengembangan pariwisata halal menjadi salah satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faktor unggul dalam *diamond* versi Porter. Keunggulan faktor kondisi tersebut berdampak pula pada faktor lainnya, contohnya pada hal *related and supporting industries*, keberadaan sektor-sektor industri terkait pariwisata yang berkualitas menjadi daya tarik lainnya bagi wisatawan ataupun investor untuk ikut dalam eksistensi Pulau Lombok sebagai salah satu destinasi halal favorit. Hal tersebut bisa diihat dari faktor *demand conditions* Pulau Lombok yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik melalui wisatawan domestik ataupun mancanegara.

Pariwisata Halal di Pulau Lombok juga didukung oleh faktor unggul dari segi *firm strategy* dan *structure.* Faktor-faktor unggul yang dimiliki oleh *halal tourism* Pulau Lombok tersebut bekerja dalam sebuah sistem yang mana keunggulan-keunggulan tersebut membentuk sebuah "*diamond"* dalam wisata halal versi Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Keberlimpahan daya tarik di beberapa unsur tersebut menyebabkan sektor pariwisata halal menjadi kerangka bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan bagi investor asing sehingga adanya peningkatan investasi asing yang terhitung masuk ke Pulau Lombok. Keunggulan Pulau Lombok dalam *halal tourism* dapat digambarkan melalui bagan di bawah ini dimana tanda (+) menunjukkan keunggulan dan tanda (-) menunjukkan kelemahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagan 4.2. :

Porter's *Diamond* versi Pulau Lombok

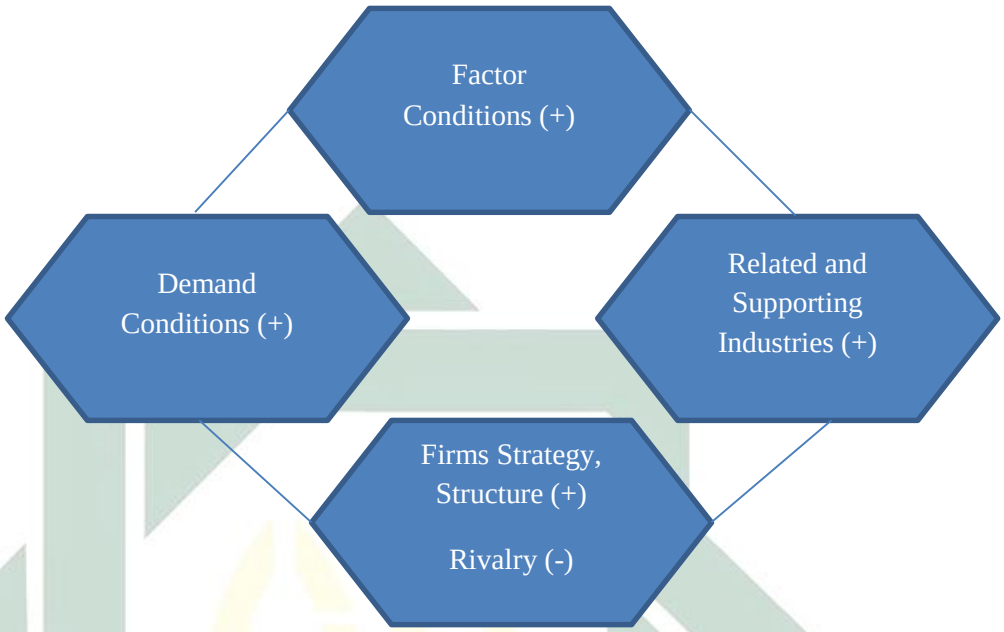

Sumber : Diolah sendiri oleh peneliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari berbagai macam penjelasan yang menyeluruh pada setiap bab, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. *Halal tourism* merupakan kegiatan wisata yang mana dalam keberlangsungannya berpedoman pada nilai-nilai syari'ah tanpa mengesampingkan tujuan awal dari wisata yakni sebagai hiburan. Konsep *halal tourism* yang diterapkan di Pulau Lombok merupakan salah satu cerminan dari karakter masyarakat setempat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan budaya adat setempat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sebagai destinasi yang tergolong *familiy-friendly*, wisata halal versi Pulau Lombok memiliki modal yang kuat untuk memenuhi kriteria tersebut. Keramah tamahan masyarakat sekitar dalam menyambut dan memperlakukan para wisatawan serta *branding* Pulau Lombok sebagai Pulau Seribu Masjid dengan jumlah masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam menjadi kekuatan nyata yang dimiliki oleh Pulau Lombok sebagai destinasi *halal tourism. Halal tourism* di Pulau Lombok menjadi lebih istimewa dikarenakan adanya dukungan penuh oleh pemerintahan setempat dalam operasionalisasi dan pengembangannya. Dengan melihat hal tersebut, *halal tourism* di Pulau Lombok menjadi salah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu potensi pariwisata unggul yang dapat ditawarkan pada wisatawan dari berbagai macam daerah baik lingkup nasional maupun internasional.

2. Model kebijakan *Halal Tourism* Pemerintah Indonesia di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat sebagai strategi peningkatan investasi asing bidang kepariwisataan berupa insentif keringanan pajak sebesar 25 %, pemangkasan izin pelayanan pajak melalui deregulasi dan debirokratisasi, peningkatan promosi bagi kegiatan usaha dalam industri pariwisata halal, koordinasi yang baik dari struktur pemerintahan dan swasta terkait pariwisata, serta kebijakan yang relevan dengan tujuan bersama dalam pengembangan wisata halal. Selain itu, model kebijakan *halal tourism* di Pulau Lombok didukung pula oleh beberapa hal di antaranya kesiapan infrastruktur pendukung dan terkait, kesiapan dan kecakapan dari sumber daya manusia dalam bidang pariwisata. Peran aktif masyarakat sekitar destinasi wisata halal juga menjadi titik pemerataan kesuksesan kebijakan *halal tourism* hingga lingkup daerah. Selain itu, kesuksesan kebijakan *halal tourism* di Pulau Lombok ditunjang pula oleh berbagai macam terobosan di bidang pariwisata halal seperti inovasi-inovasi produk wisata halal yang dikelola oleh pihak-pihak terkait baik dari kelembagaan ataupun non-kelembagaan. Berbagai macam upaya dalam peningkatan citra baik dalam dan luar negeri juga dapat dikatakan menjadi kunci

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesuksesan kebijakan *halal tourism* pemerintah Indonesia khususnya pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. SARAN

1. Bagi pemerintah

   Dengan adanya penelitian di bidang kebijakan *halal tourism* sebagai strategi peningkatan investasi asing, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan bagi pemerintah mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki untuk menunjang keberlangsungan dan perkembangan industri pariwisata halal sehingga dapat menyerap angka investasi asing yang lebih banyak lagi. Melihat begitu pentingnya peran investasi asing bagi perbaikan infrastruktur yang memadai dan mendukung sektor pariwisata yang melibatkan banyak sektor terkait.

2. Bagi masyarakat luas

   Diharapkan dengan adanya penelitian mengenai kebijakan *halal tourism* dan kaitannya dengan investasi asing, masyarakat mampu menyadari pentingnya sektor industri pariwisata halal bagi kemajuan daerah sehingga semakin aktif kontribusi masyarakat di dalamnya. Penelitian dengan tema kebijakan *halal tourism* dan investasi asing ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan pariwisata halal dari berbagai sektor.

3. Bagi akademisi

   Mengingat masih banyaknya kekurangan terkait penelitian kebijakan *Halal Tourism* Pemerintah Indonesia di Pulau Lombok,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nusa Tenggara Barat, dikarenakan beberapa kesulitan yang dialami oleh peneliti selama proses penelitian seperti sulitnya mendapatkan informasi dari informan yang terkait hingga keterbatasan waktu dan biaya dalam proses penelitian. Oleh karena itu, diharapkan kepada penelitian selanjutnya yang sejenis agar lebih mampu menguraikan tentang fenomena hubungan internasional terkait bidang pariwisata halal untuk pengembangan yang lebih positif dalam sektor apapun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Appleyard, Dennis dan Alfred Field. *International Economics, 3rd Edition.* The McGraw-Hill Companies. 1998.

Arikunto, Suharsimi. "*Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek."* Jakarta:Rhinneka Cipta, 2006.

Ilmar, Aminuddin. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia.* Kencana:Jakarta, 2006.

Mas'oed, Mochtar. *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan.* Pustaka Pelajar:Yogyakarta. 1994.

Narbuka, Chalid dan Abu Ahmad. "*Metodologi Penelitian."* Jakarta:BumiAksara, 2003.

Porter, Michael. *"The Competitive Advantage of Nations with a New Introduction."* New York:The Free Press, 1990.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.* Alfabeta:Bandung. 2010.

Suhartono, Irwan. "*Metodologi Penelitian Sosial."* Bandung:Remaja Rosda Karya, 1996.

2. Skripsi

Asih, Denda Yulia. *"Place Branding dalam Mempertahankan Pulau Lombok sebagai Destinasi Wisata Halal di Indonesia."* Skripsi. Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

Megarani, Carina. "*Kebijakan Halal Tourism Pemerintah Jepang sebagai Instrumen Strategi Nation Branding Jepang di Asia Tenggara."* Skripsi, Universitas Gadjah Mada. 2016.

Rizka R. "*Persepsi Konsumen tentang Wisata Syariah dan Pengaruhnya terhadap Minat Berkunjung."* Skripsi. Universitas Lampung, Lampung, 2016.

3. Jurnal

Awalia, Hafizah. *"Komodifikasi Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat dalam Promosi Pariwisata Islami di Indonesia."* Jurnal, Universitas Airlangga, Surabaya, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Battour, Mohamed & Mohd Nazari Ismail. *Halal Tourism Concept, Practices, Challenges, and Future.* University of Malay, Malaysia & Tanta University of Egypt. 2015.

Ikhsan Arby, *Wisata Syariah*, Jurnal Pariwisata. Universitas Muhammadiyah, Sumatera Barat, Padang, 2017.

4. Wawancara

Haris, wawancara dengan peneliti, 02 Juli 2018.

Taufan Rahmadi, wawancara dengan peneliti, 30 Mei 2018.

Ainuddin, wawancara oleh peneliti, 28 Juli 2018.

5. Laporan

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, "*Rencana Induk Pariwisata Berkelanjutan Pulau Lombok 2015-2019."* Laporan, Mataram, 2015.

Deputi Bidang Pengembangan kelembagaan Kepariwisataan, Kementerian Pariwisata. *Laporan Akhir Pengembangan Wisata Syariah.* 2015.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, "*Profil Ketenagakerjaan Tahun 2016.",* Laporan, Mataram, 2016.

DPM-PTSP Provinsi NTB, "*Laporan Realisasi Investasi per Sektor Tahun 2017."*, Mataram, 2017.

Faozal, Moh. "*Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat 2017/2018."* Laporan Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram, 2017.

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. *Rencana Strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015-2019.* 2015.

Mastercard & Crescent Rating. *Global Muzlim Travel Index*. 2016.

Rathman, Dadang Rizki. Deputi bidang Pengembangan Destinasi dan Investasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata, *Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas 2016-2019*, Jakarta, 2016.

UNCTAD, "*UNCTAD Handbook of Statistics 2017, Fact 9: Foreign Direct Investment."* New York:UNCTAD, 2017.

World Economic Forum. *The Travel and Tourism Competitiveness Report 2015.* 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

World Economic Forum. *The Travel and Tourism Competitiveness Report 2017*. 2017.

6. Peraturan Pemerintah

Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 51 Tahun 2015 tentang Wisata Halal.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.

OECD, "*Foreign Direct Investment for Development : Maximising Benefit Minimising Costs.*" Paris:OECD Publication Service, 2002.

Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

7. Website

Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, "Invest Indonesia", diakses pada tanggal 17 Maret 2018, http://www.investindonesia.go.id/.html.

BPPD Provinsi NTB, "Sabet Tiga Award di World Halal Travel Summit 2015," diakses pada tanggal 26 April 2018, http://bppdntb.com/sabet-tiga-awards-di-world-halal-travel-summit-2015.html#.WuFRwVvbzpI.html.

UNWTO, "Why Tourism?", diakses pada tanggal 26 April 2018, http://www2.unwto.org/content/why-tourism.html.

Binus University, "Competitive Advantage di Indonesia", diakses pada tanggal 14 Mei 2018, https://sbm.binus.ac.id/2016/11/15/competitive-advantage-di-indonesia/.html.

Republika, "NTB Siapkan 2 Proyek Infrastruktur berkonsep Syariah", diakses pada tanggal 26 Mei 2018, http://khazanah.republika.co.id/berita/senggang/bumigora/16/07/14/o9ybv0368-ntb-siapkan-2-proyek-infrastruktur-berkonsep-syariah.html.

UNWTO, "International Tourism 2017", diakses pada tanggal 26 Mei 2018, http://media.unwto.org/content/infographics.html.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Online, “Minimal Nilai Investasi Asing 10 Miliar”, diakses pada tanggal 22 Juni 2018, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt519360e205742/minimal-nilai-investasi-asing-rp10-m.html.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id